

**PENGARUH INDEKS HARGA KONSUMEN, TINGKAT
PENDIDIKAN, DAN PDRB TERHADAP UPAH MINIMUM
PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2013-2022**

SKRIPSI

Oleh

FITRIYANA EKA PRATIWI

NIM: 08020120041



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN

Saya, Fitriyana Eka Pratiwi, 08020120041, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 21 Desember 2023



Fitriyana Eka Pratiwi
NIM. 08020120041

Surabaya, 21 Desember 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several vertical strokes and a horizontal line extending to the right.

Abdullah Kafabih, M.S.E.

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH INDEKS HARGA KONSUMEN, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PDRB TERHADAP UPAH MINIMUM PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2013-2022

Oleh
Fitriyana Eka Pratiwi
NIM: 08020120041

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
Tanggal 3 Januari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Abdullah Kafabih, M.S.E.
NIP. 199108072019031006
(Penguji 1)
2. Debby Nindya Istiandari, M.E.
NIP. 199512142022032002
(Penguji 2)
3. Riska Ayu Setiawati, S.E., M.S.M.
NIP. 199305032019032020
(Penguji 3)
4. Helmina Ardyanfitri, M.M.
NIP. 199407282019032025
(Penguji 4)

Tanda Tangan:

.....
.....
.....
.....

Surabaya, 3 Januari 2024

Dekan,



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fitriyana Eka Pratiwi
NIM : 08020120041
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
E-mail address : fitriyanaeka89@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pengaruh Indeks Harga Konsumen, Tingkat Pendidikan, dan PDRB terhadap Upah Minimum

Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013-2022

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Februari 2024

Penulis

(Fitriyana Eka Pratiwi)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Kenaikan tingkat upah secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Regulasi penetapan upah yang ada di Indonesia masing-masing provinsi berbeda, beberapa faktor menjadi penentu penilaian tingkat upah. Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas perekonomian namun nilai upah minimum provinsi yang ditetapkan masih di bawah rata-rata upah minimum nasional. Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan terkait pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Pendidikan, dan PDRB baik secara parsial maupun simultan terhadap upah minimum provinsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif serta menggunakan analisis data panel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam rentang waktu Tahun 2013-2022, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Dari hasil uji spesifikasi model, estimasi model yang paling tepat digunakan yakni *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya secara parsial variabel IHK dengan koefisien regresi sebesar 0,0330 dengan tanda positif, tingkat pendidikan dengan koefisien regresi sebesar 0,2484 dengan tanda positif, serta PDRB dengan koefisien regresi sebesar 0,1489 dengan tanda positif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap UMP di Pulau Jawa Tahun 2013-2022. Secara simultan variabel IHK, tingkat pendidikan, dan PDRB berpengaruh terhadap UMP di Pulau Jawa Tahun 2013-2022.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi diharapkan Pemerintah Provinsi yang ada di Pulau Jawa dapat membuat regulasi baru mengenai upah minimum yang dapat diterima dengan baik oleh pengusaha maupun pekerja, sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik antara pekerja dan pengusaha serta pemerintah dalam rangka mewujudkan adanya perjanjian bersama yang setara serta seimbang antar unsur-unsur tersebut terutama membicarakan masalah upah.

Kata kunci: upah minimum provinsi, IHK, tingkat pendidikan, PDRB

ABSTRACT

An increase in wage levels will indirectly affect labor productivity. The wage setting regulations in Indonesia are different for each province, several factors determine the wage level assessment. Java is the center of economic activity, but the provincial minimum wage set is still below the average national minimum wage. The aim of this research is to answer problems related to the influence of the Consumer Price Index (CPI), Education Level, and GRDP either partially or simultaneously on the provincial minimum wage.

The research method used in this research is to use a quantitative approach and use panel data analysis. The type of data used is secondary data in the 2013-2022 time period, obtained from the Central Statistics Agency.

From the results of the model specification test, the most appropriate estimation model to use is the Fixed Effect Model. The results of this research show that partially the CPI variable with a regression coefficient of 0.0330 with a positive sign, education level with a regression coefficient of 0.2484 with a positive sign, and GDP with a regression coefficient of 0.1489 with a positive sign have a positive and significant effect on the UMP on Java Island for 2013-2022. Simultaneously, the variables CPI, education level and GRDP influence the UMP on Java Island for 2013-2022.

In an effort to increase economic growth, it is hoped that the Provincial Government on the island of Java can create new regulations regarding minimum wages that can be accepted by both employers and workers, so that it can create good relations between workers, employers and the government in order to realize equal collective agreements. and balance between these elements, especially discussing the issue of wages.

Keywords: *provincial minimum wage, CPI, education level, GRDP*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini yang berjudul **PENGARUH INDEKS HARGA KONSUMEN, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PDRB TERHADAP UPAH MINIMUM PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2013-2022**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat kesarjanaan program strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dan untuk menjalankan kewajiban mahasiswa untuk menulis skripsi sebagai laporan tugas akhir. Maka, pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya;
2. Bapak Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Ibu Nurul Lathifah, S.A., M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi UIN Sunan Ampel Surabaya;
4. Ibu Betty Silfia Ayu Utami, S.E., M.SE, selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Ekonomi UIN Sunan Ampel Surabaya;
5. Bapak Abdullah Kafabih, M.SE, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan masukan dan pengarahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu yang telah bapak berikan selama ini;

6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan motivasi, berbagi pengalaman, ilmu, serta wejangan kepada saya dan teman-teman;
7. Bapak Wisno dan Ibu Umi Amini selaku orangtua saya yang senantiasa menemani, mendoakan, dukungan secara moril dan materil, serta memberikan motivasi dan semangat;
8. Seluruh teman-teman seperjuangan kelas Ilmu Ekonomi B yang tidak pernah bosan memberikan support serta doa, dan juga semangat;
9. Mellynia Ika Damayanti, yang tidak pernah bosan saya repoti dan juga membimbing saya dari sebelum penyusunan skripsi ini hingga skripsi ini selesai;
10. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan tugas akhir in I yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
DECLARATION	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Upah Minimum	13
2.2 Indeks Harga Konsumen (IHK)	16
2.3 Tingkat Pendidikan.....	17
2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	19
2.5 Penelitian Terdahulu.....	20
2.6 Pengembangan Hipotesis	28
2.7 Kerangka Konseptual	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Variabel Penelitian	34
3.4 Definisi Operasional.....	35
3.5 Jenis dan Sumber Data	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data	38

3.7 Teknik Analisis Data	38
3.8 Pengujian Hipotesis	42
3.9 Koefisien Determinasi	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian	45
4.1.1 Kondisi Geografis Pulau Jawa	45
4.1.2 Kondisi UMP Pulau Jawa	46
4.1.3 Kondisi IHK Pulau Jawa.....	48
4.1.4 Kondisi Tingkat Pendidikan Pulau Jawa	49
4.1.5 Kondisi PDRB di Pulau Jawa	51
4.2 Hasil dan Analisis Data	53
4.2.1 Hasil Uji Spesifikasi Model	53
4.2.2 Model Regresi Data Panel	56
4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	57
4.2.4 Analisis Statistik Deskriptif	60
4.2.5 Hasil Uji Statistik	61
4.2.6 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2).....	63
4.3 Pembahasan	64
4.3.1 Pengaruh IHK, Tingkat Pendidikan, dan PDRB terhadap UMP di Pulau Jawa.....	64
4.3.2 Pengaruh IHK terhadap UMP di Pulau Jawa.....	66
4.3.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap UMP di Pulau Jawa	70
4.3.4 Pengaruh PDRB terhadap UMP di Pulau Jawa	72
BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat IHK di Pulau Jawa Tahun 2013-2022	8
Tabel 1. 2 Tingkat Pendidikan di Pulau Jawa Tahun 2013-2022 (tahun).....	9
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Satuan Variabel	37
Tabel 4. 1 Perkembangan UMP di Pulau Jawa Tahun 2013-2022	47
Tabel 4. 2 Perkembangan IHK Pulau Jawa Tahun 2013-2022	49
Tabel 4. 3 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Pulau Jawa Tahun 2013-2022	50
Tabel 4. 4 Perkembangan PDRB di Pulau Jawa Tahun 2013-2022 (Rupiah)	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow.....	54
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman	55
Tabel 4. 7 Fixed Effect Model	56
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinieritas	58
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59
Tabel 4. 10 Hasil Uji Autokorelasi	59
Tabel 4. 11 Hasil Uji F.....	61
Tabel 4. 12 Hasil Uji T.....	62
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	64
Tabel 4. 14 Tingkat Inflasi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2017.....	67
Tabel 4. 15 IHK di Pulau Jawa Tahun 2013-2022.....	68

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Upah Minimum di Negara Asia Tenggara	3
Gambar 1. 2 UMP di Indonesia berdasarkan Pulau	5
Gambar 1. 3 UMP di Pulau Jawa Tahun 2013-2022	6
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	32
Gambar 4. 1 Peta Pulau Jawa.....	45
Gambar 4. 2 Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013-2022	46
Gambar 4. 3 Indeks Harga Konsumen di Pulau Jawa Tahun 2013-2022	48
Gambar 4. 4 Rata-Rata Lama Sekolah di Pulau Jawa Tahun 2013-2022	50
Gambar 4. 5 PDRB di Pulau Jawa Tahun 2013-2022.....	52
Gambar 4. 6 Hasil Uji Normalitas.....	57



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel UMP Pulau Jawa Tahun 2013-2022 (Rupiah)	83
Lampiran 2 Tabel IHK Pulau Jawa Tahun 2013-2022 (persen)	84
Lampiran 3 Tabel Rata-Rata Lama Sekolah di Pulau Jawa Tahun 2013-2022	85
Lampiran 4 Tabel PDRB ADHK Menurut Pengeluaran di Pulau Jawa Tahun 2013- 2022 (Rupiah).....	86
Lampiran 5 Hasil Uji Common Effect Model.....	87
Lampiran 6 Hasil Uji Fixed Effect Model	88
Lampiran 7 Hasil Uji Chow	89
Lampiran 8 Hasil Uji Random Effect Model.....	90
Lampiran 9 Hasil Uji Hausman.....	91
Lampiran 10 Hasil Uji Normalitas.....	92
Lampiran 11 Hasil Uji Multikolinieritas.....	93
Lampiran 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	94
Lampiran 13 Hasil Uji Autokorelasi.....	95

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

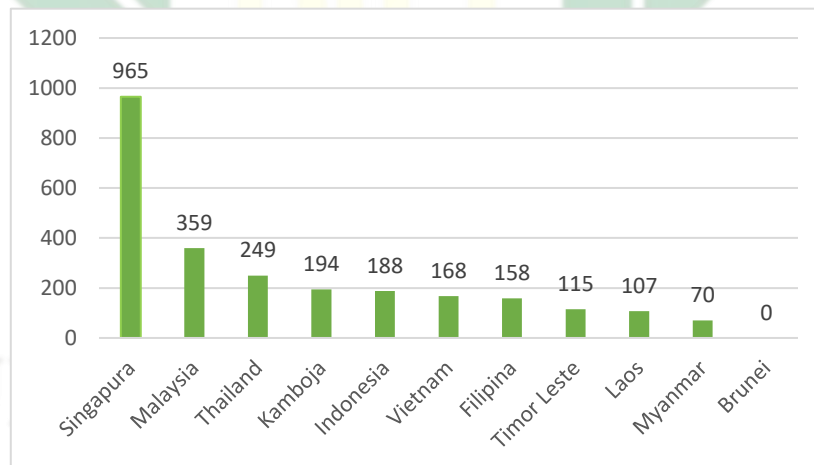
Indonesia perlu meningkatkan PDB per kapita dari 4.700 dolar AS pada tahun 2030 hingga lebih dari 10.000 dolar AS agar memenuhi syarat sebagai negara maju pada tahun 2045. Selain itu, Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi ke depan dengan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi menjadi 7%, bukan hanya 5%. Setelah epidemi ini, perekonomian kawasan ASEAN tumbuh dengan cepat; Malaysia menduduki peringkat teratas di kawasan Asia Tenggara dalam hal pertumbuhan, dengan 8,7% pada tahun 2022. Disusul dalam hal pertumbuhan ekonomi adalah Filipina sebesar 7,6% dan Vietnam sebesar 8,02%. Perekonomian Indonesia hanya tumbuh sebesar 5,31%. Pencapaian PDB sebesar itu dikarenakan kinerja ekonomi yang kuat pada triwulan IV (Q4) 2022, yang dapat dilihat dari pulihnya belanja swasta dan investasi, pengangguran yang menurun serta mata uang ringgit yang menguat (Isna Rifka Sri Rahayu, 2023; Setyorini, 2023)

Perekonomian Indonesia pada tahun 2022 tumbuh lebih tinggi (5,31%) dibanding pada tahun 2021 yang tumbuh hingga 3,70% (Badan Pusat Statistik, 2023). Komponen *economic growth* (Todaro, 2006) adalah sebagai berikut: pertama, pertumbuhan modal, yang mencakup semua investasi baru yang dilakukan dalam jangka panjang; sumber daya manusia melalui pembangunan fisik, pendidikan, dan terkait pekerjaan. Kedua, bertambahnya jumlah pegawai pada akhirnya mengakibatkan bertambahnya pegawai angkatan kerja. Ketiga, kemampuan teknologi baru.

Berkembangnya perekonomian suatu negara merupakan salah sebuah takaran kemajuannya. *Economy growth* dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dilihat dari output suatu produksi. Dengan bertumbuhnya perekonomian di Indonesia, maka produksi akan barang dan jasa juga bertambah. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada salah satu faktor produksi yaitu pekerja. Salah satu elemen manufaktur yang penting untuk mendapatkan hasil yang lebih besar adalah tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2023; Sihombing, 2015).

Dalam dunia ketenagakerjaan di zaman yang semakin maju ini teknologi semakin canggih, sehingga persaingan tenaga kerja menjadi semakin ketat. Dan tenaga kerja banyak yang tergantikan dengan mesin-mesin yang modern. Banyak permasalahan yang muncul di dunia kerja akibat hal ini. Topik upah merupakan salah satu isu yang berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan. Kisaran keadaan sosial dan ekonomi yang ada di Asia Tenggara tercermin dalam upah minimum negara-negara anggotanya. Dengan upah minimum sebesar USD 965 per bulan, Singapura, yang merupakan pusat keuangan utama, memiliki upah minimum tertinggi di Asia Tenggara. Mengingat tingginya biaya hidup di Singapura, statistik ini menggambarkan tingginya standar hidup di negara tersebut. Upah minimum di Malaysia yaitu kisaran USD 359 setiap bulan. Negara tersebut telah meningkatkan tingkat upah minimum baru-baru ini dan memiliki perekonomian yang lebih kuat dibandingkan beberapa negara tetangganya. Upah minimum di Thailand, yang mewakili tingkat kehidupan yang wajar, adalah sekitar USD 249 per bulan. Namun upah minimum masih berada pada kisaran yang lebih rendah di negara-negara seperti Indonesia dan Kamboja, yang

masing-masing berada pada kisaran USD 188 dan USD 194 per bulan. Hal ini menggambarkan bagaimana, meskipun ada upaya terus-menerus untuk menaikkan upah minimum, mayoritas pekerja di negara-negara tersebut terus menghadapi kesulitan ekonomi. Upah minimum di Vietnam dan Filipina masing-masing kisaran USD 168 dan USD 158 per bulan, sedangkan upah minimum di Timor Leste, Laos, dan Myanmar jauh lebih rendah, yaitu sekitar USD 115, USD 107, dan USD 70 per bulan. Hal tersebut menunjukkan kesulitan keuangan yang dialami oleh warga negara tertentu di negara-negara ini (Armavilla, 2023).



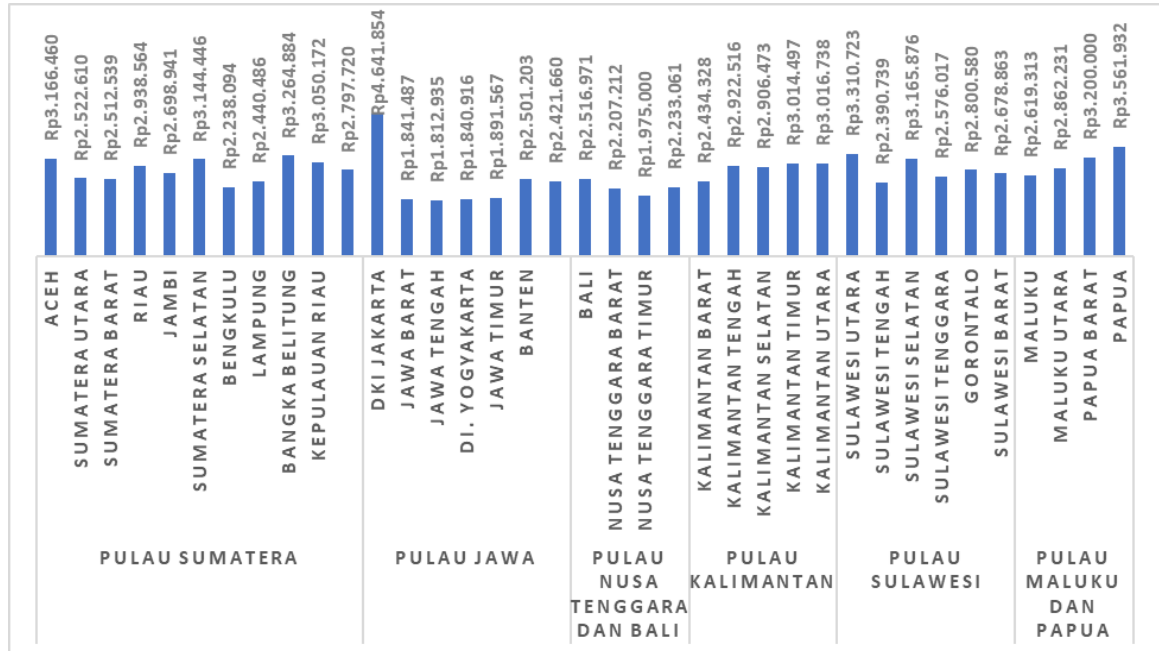
Sumber: *Country Economy* (2023)

Gambar 1. 1 Upah Minimum di Negara Asia Tenggara

Upah merupakan bentuk balas jasa dari perusahaan berupa penghasilan untuk tenaga kerja yang telah diberikan dari pemberi kerja. Pekerja sangat bergantung pada besaran upah yang mereka terima guna memenuhi kebutuhan pokok mereka, termasuk makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya (Meinita, 2022). Upah yang tinggi mungkin berdampak pada produktivitas pekerja. Hal ini sesuai dengan prinsip efisiensi upah

yang menyatakan bahwa ketika upah naik maka produktivitas pekerja juga akan meningkat. Hal ini karena jika pekerja mendapat upah yang memadai, mereka akan mampu mendapatkan nutrisi dan layanan kesehatan yang baik, yang nantinya akan meningkatkan kesehatan dan produktivitas mereka (Rahmi & Riyanto, 2022). Namun bagi para pemberi kerja, upah merupakan komponen biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga sering kali perusahaan menekan biaya yang dikeluarkan dengan cara memberikan upah yang tergolong rendah di bawah rata-rata. Karena hal tersebut dapat menambah biaya atau *cost* dan mengurangi keuntungan.

Pemerintah menetapkan upah minimum sebagai upaya mengatasi permasalahan yang timbul antara pekerja dan pengusaha. Setiap tahunnya, upah minimum ditetapkan dengan kerangka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang memperhitungkan tingkat inflasi dan perkembangan ekonomi (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, 2018). Pemerintah melakukan penetapan upah minimum ini dengan tujuan agar para pekerja tercukupi kebutuhannya serta dapat meningkatkan taraf hidupnya. Tujuan yang lain yaitu agar meningkatkan konsumsi masyarakat, sehingga akan memunculkan usaha dengan jenis yang baru. Selain itu dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan (Islami & Anis, 2019).



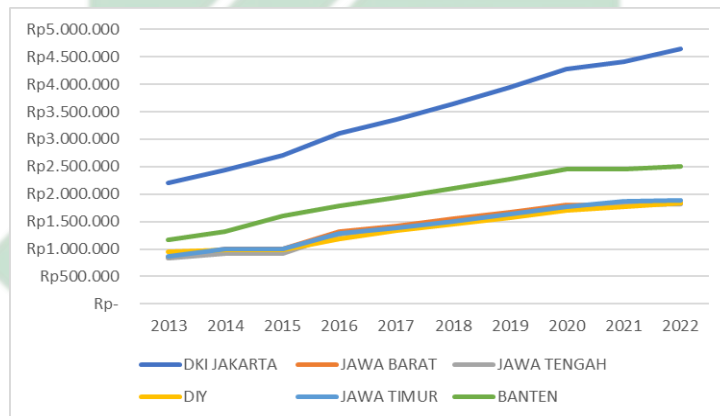
Sumber: Badan Pusat Statistik (2013-2022)

Gambar 1. 2 UMP di Indonesia berdasarkan Pulau

Grafik di atas menunjukkan bahwasanya di Indonesia, upah minimum berbeda-beda di setiap provinsi. Namun, provinsi-provinsi tertentu khususnya di Pulau Jawa menentukan upah minimum di bawah standar nasional. Meskipun beberapa provinsi di pulau lainnya menetapkan upah minimum provinsi (UMP) di atas standar upah minimum nasional, hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa menentukan UMP di bawah standar tersebut (Ferbriki Nurtyas, 2014). Pulau Jawa memiliki UMP yang relatif rendah dibandingkan provinsi di Indonesia, meskipun merupakan pulau dengan jumlah penduduk terbesar. Seharusnya jika di suatu daerah mengalami peningkatan jumlah penduduk, maka PDB di daerah tersebut juga akan meningkat, karena semakin banyaknya penduduk usia produktif.

Dengan Rp1.812.935,00 pada tahun 2022, Jawa Tengah akan memiliki UMP terendah se-Indonesia. Setelah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta

memiliki UMP terendah kedua yaitu Rp1.840.915,00. Menyusul UMP sebesar Rp1.841.487,00 dan Rp1.891.567,00 masing-masing adalah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Upah minimum enam provinsi di Pulau Jawa ditampilkan di bawah ini untuk tahun 2013 hingga 2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2013-2022)

Gambar 1. 3 UMP di Pulau Jawa Tahun 2013-2022

Gambar 1.2 menggambarkan kenaikan UMP Pulau Jawa antara tahun 2013 hingga tahun 2022. Dari seluruh provinsi pada Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat UMP teratas. UMP DKI Jakarta meningkat sebesar 111%, dari Rp2.200.000,00 pada tahun 2013 menjadi Rp4.641.854,00 pada tahun 2022. Setiap provinsi di Pulau Jawa pun mengikuti kenaikan UMP. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta naik sebesar 94%, Provinsi Jawa Barat sebesar 117%, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur sebesar 118%, serta Provinsi Banten sebesar 114%. Pemerintah menentukan upah minimum berdasarkan apa yang disebut dengan KHL, yang mencakup sejumlah pengeluaran seperti perumahan, makanan dan minuman, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan rekreasi (Meinita, 2022). Penting

untuk mempertimbangkan produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi ketika menetapkan upah minimum. Penentuan upah berdampak pada penyediaan standar hidup yang dapat diterima bagi pekerja (Meinita, 2022).

Upah minimum tahun 2022 di beberapa wilayah Pulau Jawa, menurut Dirjen Kemnaker, tergolong rendah karena dasar perhitungannya adalah upah minimum tahun sebelumnya setelah diberlakukannya PP Nomor 78 Tahun 2015. Tahun pertama diterapkannya formula PP Nomor 78 Tahun 2015 adalah pada tahun 2016. Sementara itu, pada akhir tahun 2014, landasan KHL digunakan untuk menentukan upah minimum tahun 2015. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Tingkat Pendidikan adalah dua faktor tambahan yang digunakan selain faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya untuk menentukan pendapatan.

Salah satu instrumen dalam perhitungan inflasi yaitu IHK. Nama lain dari IHK yaitu *Consumer Price Index* (CPI). Harga, produk, dan jasa yang dibeli masyarakat diukur menggunakan IHK (Dewi dkk., 2019). Indonesia memilih tahun 2018 sebagai tahun dasar perhitungan inflasi karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat pada tahun 2020. Survei Biaya Hidup (SBH), salah satu sumber utama yang digunakan untuk menghitung IHK, telah mengalami sejumlah revisi. Perubahan dilakukan pada metodologi perhitungan CPI, paket produk, diagram penimbangan, cakupan, dan kategorisasi komoditas baik pada perhitungan tahun 2012 maupun 2018. Sembilan puluh kota berpartisipasi dalam Survei Biaya Hidup; delapan kota merupakan kota baru dalam cakupan survei, dan delapan puluh dua kota termasuk dalam cakupan SBH pada

tahun 2012. Terdapat 56 kabupaten/kota dan 34 ibu kota provinsi di antara 90 kota tersebut (Badan Pusat Statistik, 2022).

Tabel 1. 1 Tingkat IHK di Pulau Jawa Tahun 2013-2022

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2013	144,27	145,87	141,90	145,65	146,50	148,87
2014	119,41	117,93	118,83	116,84	118,00	122,94
2015	123,35	120,96	122,30	120,45	121,01	128,22
2016	126,27	124,21	125,29	123,21	123,57	132,54
2017	130,97	129,06	130,16	128,39	128,15	138,68
2018	130,97	129,06	130,16	128,39	128,15	138,07
2019	135,25	133,22	133,98	131,81	131,47	142,35
2020	139,62	136,92	137,53	135,46	134,19	147,23
2021	105,96	105,69	105,09	106,10	104,75	106,06
2022	107,58	107,46	107,06	108,53	106,86	108,19

Sumber: Badan Pusat Statistik (2013-2022)

Berdasarkan statistik Badan Pusat Statistik mengenai IHK Indonesia tahun 2018 hingga tahun 2022, IHK mencapai titik tertinggi pada tahun 2019 sebesar 139,07 sebelum turun menjadi 105,68 pada tahun 2020. Peningkatan nilai IHK berpotensi mengangkat suku bunga, meningkatkan jumlah uang beredar, membuat mata uang lebih menarik, serta mempercepat inflasi (Sumantri & Latifah, 2019). Tingkat inflasi ini yang digunakan dalam penyesuaian upah.

Perkembangan IHK dari tahun 2013 hingga 2022 bergerak fluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 IHK tertinggi terjadi di Provinsi Banten, yaitu sebesar 147,23 dan pada tahun berikutnya menurun sebesar 106,06. Akibat rendahnya laju inflasi pada tahun 2021, yaitu 1,56% (yoy) yang sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, banyak provinsi lain yang mengalami penurunan nilai IHK. Mengingat dampak kecil dari tekanan harga global terhadap harga lokal, rendahnya

inflasi dipengaruhi oleh tidak adanya permintaan domestik yang kuat seiring dengan langkah-langkah pembatasan pergerakan yang harus diterapkan untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Selain IHK, tingkat pendidikan mempunyai peranan yang cukup besar dalam mempengaruhi pendapatan. Untuk melihat kemampuan seseorang, tingkat pendidikan menjadi ukuran dalam melihat kemampuan seseorang dan juga efisiensi dan efektifitas dalam menyelesaikan pekerjaannya (Meinita, 2022). Pekerjaan yang diselesaikan dengan baik akan meningkatkan pendapatan yang diterima (Islami & Anis, 2019). Rendahnya produktivitas disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia yang juga berdampak pada rendahnya upah. Mendapatkan pendidikan adalah salah sebuah metode guna menjadi lebih produktif. Pendidikan juga berperan agar seseorang tidak mengalami ketertinggalan dan keterbelakangan suatu daerah (Kuncoro, 2000). Pendidikan adalah proses yang membantu orang menjadi lebih tanggap, memahami, dan sadar sosial. Keterampilan yang disebutkan di atas dapat diperoleh melalui pengetahuan intelektual serta pola pikir mereka yang telah menerima pelatihan untuk menjalani kehidupan yang lebih menguntungkan (Ichsan, 2016).

Tabel 1. 2 Tingkat Pendidikan di Pulau Jawa Tahun 2013-2022 (tahun)

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2013	10,47	7,58	6,80	8,72	6,90	8,17
2014	10,54	7,71	6,93	8,84	7,05	8,19
2015	10,70	7,86	7,03	9,00	7,14	8,27
2016	10,88	7,95	7,15	9,12	7,23	8,37
2017	11,02	8,14	7,27	9,19	7,34	8,53
2018	11,06	8,61	7,84	9,73	7,93	8,93
2019	11,11	8,79	8,03	9,83	8,11	9,07

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2020	11,17	8,96	8,19	9,95	8,31	9,22
2021	11,20	9,03	8,26	10,04	8,37	9,29
2022	11,30	9,14	8,38	10,07	8,50	9,46

Sumber : Badan Pusat Statistik (2013-2022)

Setiap tahunnya, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Pulau Jawa untuk bersekolah meningkat. Provinsi DKI Jakarta memiliki pangsa sebesar 10,47% pada tahun 2013 dan 11,30% pada tahun 2022. Di Provinsi DKI Jakarta, rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 8% antara tahun 2013 dan 2022. Provinsi lain di pulau Jawa juga mengalami perluasan pada periode ini, dengan Provinsi Jawa Barat berkembang sebesar 21%, Jawa Tengah sebesar 23%, DIY sebesar 15%, Jawa Timur sebesar 23%, dan Banten sebesar 16%.

Pergerakan yang positif dari tahun ke tahun ini diharapkan dapat menaikkan produktivitas dan juga sebagai salah satu investasi yang meningkatkan keahlian. Jika keahlian yang dicapai atau dimiliki oleh seseorang semakin tinggi, maka output yang dihasilkan mereka juga dapat meningkat. Oleh karena itu, dapat mempengaruhi input yang diterima perusahaan dan juga akan terjadi perubahan terhadap sistem pengupahan tenaga kerja.

Produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja menentukan struktur upah pekerja. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat bertambah seiring dengan meningkatnya output yang didapatkan oleh angkatan kerja. Produk regional bruto dari semua produk dan jasa yang diperoleh dari seluruh sektor ekonomi suatu daerah disebut

PDRB. Fluktuasi nilai PDRB dapat kita lihat sebagai fungsi dari proses manufaktur suatu daerah (Kyswantoro, 2017).

Dalam pengukuran perekonomian serta untuk mengetahui besar kecilnya produksi suatu barang dan jasa suatu daerah, PDRB memiliki peran yang sangat vital. Besar kecilnya produksi juga mempengaruhi upah minimum di suatu daerah tersebut. Agar PDRB tumbuh seiring dengan peningkatan output, maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Meskipun demikian, nilai PDRB masih tinggi di beberapa provinsi di Indonesia, seperti di Pulau Jawa, pendapatan rata-rata masyarakat masih di bawah standar upah minimum nasional.

Berdasarkan fakta tertentu, satu-satunya kriteria yang digunakan untuk menetapkan upah minimum nasional adalah kebutuhan hidup yang layak. IHK dan tingkat pendidikan adalah dua variabel lain yang mempengaruhi upah minimum. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut guna mengetahui apakah faktor-faktor tersebut berdampak terhadap upah minimum atau tidak. Oleh karena itu, “Pengaruh IHK, Tingkat Pendidikan, dan PDRB Terhadap Upah Minimum Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2013 – 2022” merupakan proyek studi yang tertarik untuk dilakukan oleh penulis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Pendidikan, dan PDRB berpengaruh secara parsial terhadap UMP di Pulau Jawa Tahun 2013-2022?
2. Apakah Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Pendidikan, dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap UMP di Pulau Jawa Tahun 2013-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Pendidikan, dan PDRB terhadap UMP
2. Mengetahui dan menganalisis secara simultan pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Pendidikan, dan PDRB terhadap UMP.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas pemahaman kita mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi upah minimum di setiap provinsi.
2. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mengambil manfaat dari temuan penelitian ini guna mengetahui bahwa UMP itu tidak hanya ditinjau dari KHL saja, namun dari IHK, tingkat pendidikan, dan PDRB. Setelah mengetahui hasil pengaruh variabel-variabel tersebut, diharapkan bisa sebagai acuan dalam penentuan UMP.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Upah Minimum

Tunjangan yang diberikan untuk pekerja atau karyawan untuk tujuan pembayaran atas jasa yang diberikan dan diberikan oleh pemberi kerja dikenal sebagai upah. Upah merupakan “hak-hak pekerja/buruh yang dinyatakan serta diterima berupa uang untuk imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditentukan serta dibayar berdasarkan perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan.” UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa perundang-undangan dapat memuat tunjangan untuk pekerja serta keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan diberikan (DPR, 2003). Menurut Sadono Sukirno, upah adalah sejumlah uang yang dikumpulkan melalui beberapa jenis jasa yang diberikan serta ditawarkan oleh pekerja kepada pemberi kerja (Sukirno, 2019)

Saat mengkaji pendapatan tenaga kerja, para ekonom biasanya berfokus pada upah riil rata-rata, yang mewakili daya beli satu dolar untuk setiap jam kerja yaitu, upah tunai dibagi dengan biaya hidup (Samuelson, 2003). Ada hipotesis yang disebut efisiensi upah dalam perekonomian tradisional. Menurut hipotesis ini, karyawan yang menerima kompensasi tinggi akan lebih produktif. Argumen upah efisiensi, yang lebih umum terjadi di beberapa negara berkembang, berpendapat bahwa upah berdampak pada gizi (Mankiw, 2006). Pekerja yang sehat dapat lebih produktif, dan mereka yang mendapat upah yang adil juga akan mendapatkan gizi yang lebih baik. Menurut teori

efisiensi upah, produktivitas pekerja meningkat sebanding dengan tingkat upah (Karl E. Case, 2002).

Menurut teori upah minimum Cafferty (1990), upah yang lebih tinggi dan sesuai mendorong pekerja menjadi lebih produktif (Mankiw, 2006). Menurut prinsip upah minimum, jika pekerja mendapatkan cukup uang untuk menutupi kebutuhan minimum sehari-harinya untuk makan dan kebutuhan hidup lainnya. Karena itu, jika kebutuhan dasar tubuh seorang pekerja terpenuhi, secara tidak langsung mereka dapat melakukan yang terbaik. Teori upah minimum ini juga menyarankan bahwa kebutuhan fisik dasar harus dipertimbangkan ketika menetapkan upah minimum, karena hal ini pada akhirnya akan membantu individu meningkatkan produktivitas pekerja. Akibat dampak ekonomi, produktivitas pekerja yang tinggi pada akhirnya akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Untuk membantu individu di negara-negara berkembang mencapai kebutuhan gizi mereka dan bekerja lebih keras dan produktif, pembayaran efisiensi harus diterapkan. Landasan kebijakan upah minimum Indonesia adalah Permenaker Nomor 15 Tahun 2018, yang didasarkan pada gagasan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak atas penghidupan serta penghidupan yang layak (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, 2018).

Pada metode penghitungan upah minimum berikut, ubah nilai Upah Minimum (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2021):

$$\text{Penyesuaian Nilai UM} = \text{Inflasi} + (\text{PE} \times \alpha)$$

Penyesuaian Nilai Upah Minimum atau Penyesuaian Nilai UM adalah hasil perkalian α dan inflasi. Sedangkan Inflasi adalah inflasi provinsi yang terbilang sebagai

persentase dari waktu September tahun sebelumnya terhadap periode September tahun berjalan. PE atau *economy growth* provinsi ditentukan sebagai berikut: a. bagi provinsi dihitung sebagai perubahan pertumbuhan ekonomi provinsi dari triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat tahun berjalan ke triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada dua (dua) tahun sebelumnya; b. Untuk kabupaten dan kota, perubahan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I, II, III, dan IV tahun sebelumnya dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota pada triwulan I, II, III, dan IV pada dua triwulan sebelumnya. α = Format indeks dengan nilai tertentu dalam range tertentu, yaitu 0,10 (nol koma satu nol) hingga 0,30 (nol koma tiga nol), yang mewakili andil pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan ini terdiri atas upah dan non-upah, sesuai Surat Edaran Republik Indonesia No.SE-07/MEN/1990 dari Menteri Tenaga Kerja. Berikut komponen-komponen pendapatan upah:

- a. Upah pokok
- b. Tunjangan tetap
- c. Upah tidak tetap

Jenis-jenis penghasilan berikut ini yang bukan merupakan upah:

- a. Tunjangan Hari Raya (THR)
- b. Fasilitas
- c. Bonus

2.2 Indeks Harga Konsumen (IHK)

Statistik yang dikenal sebagai IHK melacak perubahan biaya produk dan layanan yang dibeli masyarakat umum selama periode waktu tertentu (Tiflatul Husna dkk., 2020). Selain itu, IHK dapat digunakan untuk menghitung perubahan harga produk serta jasa selama jangka waktu tertentu (Karlina, 2017). IHK, yang sering dianggap sebagai metrik ekonomi penting, digunakan untuk menggambarkan pergeseran rata-rata harga eceran untuk kategori barang dan jasa tertentu di titik penjualan (Sumantri & Latifah, 2019). IHK mengukur standar transformasi harga sekelompok barang serta jasa rumah tangga semasa jangka tertentu. Salah sebuah metode guna mengetahui tingkat inflasi yaitu IHK. Ketika kita membicarakan harga kita langsung mengkaitkannya dengan sejumlah uang, dengan sejumlah uang kita menentukan suatu nilai harga yang harus dibayarkan untuk mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Harga merupakan tingkat dimana uang yang digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa (Mankiw, 2006).

Salah satu instrumen dalam perhitungan inflasi yaitu IHK. Indonesia memilih tahun 2018 sebagai tahun dasar perhitungan inflasi karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat pada tahun 2020. Survei Biaya Hidup (SBH), salah satu sumber utama yang digunakan untuk menghitung IHK, telah mengalami sejumlah revisi. Perubahan dilakukan pada metodologi perhitungan CPI, paket produk, diagram penimbangan, cakupan, dan kategorisasi komoditas baik pada perhitungan tahun 2012 maupun 2018. Sembilan puluh kota berpartisipasi dalam Survei Biaya Hidup; delapan kota merupakan kota baru dalam cakupan survei, dan delapan puluh dua kota termasuk

dalam cakupan SBH pada tahun 2012. Terdapat 56 kabupaten/kota dan 34 ibu kota provinsi di antara 90 kota tersebut (Badan Pusat Statistik, 2022). IHK dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$IHK = \frac{P_n}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Harga sekarang

P_o = Harga pada tahun dasar

IHK bervariasi secara berkala untuk menunjukkan seberapa cepat barang dan jasa tumbuh (inflasi) atau menurun (deflasi) (Badan Pusat Statistik, 2022). Perubahan pada harga tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat upah. Jika IHK naik, artinya terjadi inflasi. Hal tersebut dapat mempengaruhi kekuatan daya beli konsumen dan mendorong permintaan untuk kenaikan upah.

2.3 Tingkat Pendidikan

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam (Nurkholis, 2016) untuk memajukan kesempurnaan hidup, yang meliputi penghidupan dan pengasuhan anak yang selaras dengan alam dan manusia lain, maka Pendidikan adalah upaya budaya dengan tujuan membimbing siswa menjalani kehidupan dan membentuk tubuh dan jiwa mereka agar sesuai dengan kepribadian unik mereka. Menurut *Edgar Dalle* dalam (Sholichah, 2018) untuk dapat mengikuti kegiatan sekolah dan mempersiapkan masa depan, pendidikan merupakan upaya yang dilakukan oleh orang, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan adalah sarana untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan untuk

berperilaku baik dalam lingkungan sosial. Untuk mencapai tujuan keberadaan yang lebih makmur, kemampuan ini berasal dari kecerdasan akademis dan sikap individu yang dipoles (Ichsan, 2016).

Para ahli di atas berpendapat bahwa pendidikan merupakan sebuah usaha untuk memperbanyak, memperluas, dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta kemampuan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa melalui proses belajar guna membentuk manusia yang lebih baik. orang yang dapat hidup bermasyarakat dan sehat jasmani dan rohani. Investasi sumber daya manusia yang dapat mengupgrade standar SDM adalah pendidikan. Melalui tingkat keterampilan dan produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, pendidikan, sebagai alat untuk meningkatkan kualitas manusia, secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan (Meinita, 2022).

Dalam teori model *Cobb Douglas* menjelaskan bahwa produktivitas memiliki hubungan dengan modal manusia (*human capital*). Seperti dalam model berikut:

$$Y = AK_{\alpha}L_{\beta}$$

Jika A , α , dan β adalah konstanta positif, maka tenaga kerja diwakili oleh L , modal oleh K , dan produktivitas oleh Y . Para ekonom sering menggunakan kata "modal manusia" untuk merujuk pada sumber daya manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan kemampuan lain yang jika dikembangkan, mungkin akan meningkatkan produktivitas (Putri & Kusreni, 2017). Seperti yang dikatakan (Simanjuntak, 1985) produktivitas atau kinerja seseorang di dunia kerja meningkat seiring dengan tingkat pendidikannya. Hal ini sesuai dengan prinsip efisiensi upah, yang mengatakan bahwa semakin tinggi upah maka produktivitas pekerja akan meningkat. Hal ini karena kesehatan dan

produktivitas pekerja akan meningkat jika mereka menerima upah yang cukup karena mereka mampu membeli makanan sehat dan perawatan medis (Rahmi & Riyanto, 2022).

Terdapat korelasi langsung antara tingkat pendidikan dengan pendapatan karena produktivitas meningkat seiring dengan tingkat pendidikan. Produktivitas karyawan akan meningkat, yang menyebabkan upah lebih tinggi. Seperti dalam penelitian (Nugraha, 2017) menunjukkan bahwa produktivitas kerja sangat dipengaruhi oleh jumlah pendidikan. Pendapatan yang diterima meningkat seiring dengan besarnya produktivitas tenaga kerja.

2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB yaitu total bertambahnya nilai yang didapatkan dari semua faktor perekonomian pada suatu daerah. PDRB adalah total nilai barang serta jasa jadi yang didapatkan oleh seluruh entitas ekonomi pada suatu wilayah khusus. Salah sebuah cara menghitung PDRB yaitu dengan memanfaatkan nilai tambah output (Meinita, 2022). Menggunakan teori fungsi produksi, khususnya:

$$Q = F (K,L)$$

Keterangan:

Q = Tingkat Output

K = Barang Modal

L = Labor/tenaga kerja

Menurut fungsi produksi, meningkatnya tenaga kerja dan modal dapat menekan bertambahnya output. Akibatnya, bertambahnya output dapat mempengaruhi

PDRB suatu daerah, yang pada nantinya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian (Charysa, 2013) ini menunjukkan hubungan antara upah minimum dan pembangunan ekonomi. Upah minimum akan naik sebagai akibat dari kuatnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penetapan upah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian (Meinita, 2022) yang menganalisis pengaruh inflasi, tingkat pendidikan, dan PDRB terhadap upah minimum. Penelitian ini mempunyai variabel pembanding, khususnya variabel PDRB dan tingkat pendidikan. Durasi pendidikan seseorang akan meningkatkan nilai upahnya, hal ini terlihat dari pengaruh positif dan besar yang ditunjukkan oleh tingkat pendidikan. Selain itu, variabel PDRB menunjukkan pengaruh positif dan besar terhadap upah minimum. Artinya, pesatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan berpengaruh terhadap penetapan upah minimum sehingga berdampak pada kenaikan upah minimum.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Variabel	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Febrika Nurtiyas	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014	Metode Kuantitatif	X1 : IHK X2 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja X3 : PDRB X4 : Pendapatan per Kapita Y : Upah Minimum Provinsi	1. UMP tidak terpengaruh oleh CPI. 2. Dampak TPAK terhadap nilai UMP adalah negatif. 3. Dampak PDRB terhadap nilai UMP adalah negatif. 4. Nilai UMP mempunyai korelasi positif dengan pendapatan per kapita.	- Ada 2 variabel independen yang berbeda - Tahun penelitian berbeda	- Ada 2 variabel independen yang sama - Variabel dependen yang digunakan sama - Metode penelitian dan alat analisis yang digunakan sama.
2.	Nadia Islami, Ali Anis	Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (2012-2017)	Deskriptif dan Asosiatif, dengan menggunakan variabel independen yaitu upah minimum provinsi, pendidikan, kesehatan, dan variabel dependen yaitu kemiskinan. Dalam penelitian ini dibahas seberapa besar pengaruh variabel bebas dan terikat dengan menggunakan analisis regresi	X1 : Upah Minimum Provinsi X2 : Pendidikan X3 : Kesehatan Y : Kemiskinan	Temuan estimasi menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh upah minimum provinsi, kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh pendidikan, dan kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh kesehatan. Secara keseluruhan, upah minimum provinsi, tingkat kesehatan, dan pendidikan mempengaruhi kemiskinan di Indonesia.	-Variabel upah disini sebagai variabel independen, sedangkan variabel upah dalam penelitian yang akan dilakukan sebagai variabel dependen. -Lokasi penelitian -Alat analisis yang digunakan	-Menggunakan variabel upah dalam penelitian

No	Penulis	Judul	Metode	Variabel	Hasil	Perbedaan	Persamaan
			panel dan menggunakan metode Fixed Effect Model.				
3.	Resti Amelia	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Kebutuhan Hidup Layak terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Kalimantan (2010-2019)	Metode kuantitatif, Analisis regresi linier berganda data panel dengan program Eviews	X1 : Pertumbuhan Ekonomi X2 : Inflasi X3 : Kebutuhan Hidup Layak Y : Upah Minimum Provinsi	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi secara negatif dan tidak signifikan, inflasi secara negatif dan signifikan, dan kebutuhan akan standar hidup yang layak secara positif dan signifikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan akan taraf hidup yang layak merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan, dan faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhinya secara bersamaan atau bersamaan-sama.	-Variabel independen yang digunakan dalam penelitian -Lokasi penelitian -	-Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian -Metode Penelitian
4.	Armidi, Erfit, Yulmardi	Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Harga Konsumen Terhadap Upah Minimum Prov Jambi	analisis deskriptif dan analisis kuantitatif	X1 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Prov Jambi X2 : Indeks Harga Konsumen Prov Jambi	Temuan analisis menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: antara tahun 2000 hingga 2015, rata-rata pertumbuhan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,09%, rata-rata pertumbuhan indeks harga	-Salah satu variabel independen yang digunakan berbeda -Lokasi Penelitian	-Salah satu variabel independen dan variabel dependennya sama - Metode penelitian

No	Penulis	Judul	Metode	Variabel	Hasil	Perbedaan	Persamaan
		(2000-2015)		Y : Upah Minimum Prov Jambi	<p>konsumen sebesar -1,00%, dan rata-rata pertumbuhan upah minimum provinsi sebesar -1,00%. 16,77%. Upah Minimum Provinsi secara signifikan dipengaruhi oleh Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada saat yang bersamaan. Indeks Harga Konsumen mempengaruhi upah minimum provinsi, namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap upah minimum provinsi.</p>		
5.	Yohanna Adisti Krisna Dwi Putri , Sri Kusreni	Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Dan Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Di Indonesia (2016-2020)	Pendekatan kuantitatif dengan metode data panel (pooled data)	X1 : Kesehatan X2 : Tingkat pendidikan X3 : Upah Y : Produktivitas Tenaga Kerja	Analisis regresi data panel menghasilkan hal ini Studi menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang besar antara upah minimum, tingkat pendidikan, status kesehatan, dan produktivitas pekerja. Meskipun upah minimum dan tingkat pendidikan tidak banyak berpengaruh terhadap produktivitas pekerja di Indonesia, kesehatan mempunyai pengaruh yang besar dan bermanfaat terhadap produktivitas.	-Salah satu variabel independen dan dependen berbeda -Lokasi penelitian	-Salah satu variabel independent nya sama -Metode penelitian sama

No	Penulis	Judul	Metode	Variabel	Hasil	Perbedaan	Persamaan
6.	Widya Meinita, Saparuddin Mukhtar, Ari Saptano	Pengaruh Inflasi, Tingkat Pendidikan dan PDRB Terhadap Upah Minimum Di Pulau Jawa Tahun 2015-2019	Pendekatan kuantitatif, fixed model.	X1 : Inflasi X2 : Tingkat Pendidikan X3 : PDRB Y : UMP	<p>1. Upah minimum provinsi Pulau Jawa terkena dampak positif dan signifikan inflasi pada tahun 2015 hingga 2019.</p> <p>2. Upah minimum provinsi Pulau Jawa berkorelasi positif dan signifikan dengan tingkat pendidikan pada tahun 2015 hingga 2019.</p> <p>3. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, PDRB memberikan dampak positif dan besar terhadap upah minimum provinsi di Pulau Jawa.</p> <p>4. Pada tahun 2015 hingga 2019, upah minimum provinsi di Pulau Jawa dipengaruhi secara signifikan oleh kombinasi faktor inflasi, tingkat pendidikan, dan PDRB..</p>	<p>-Salah satu variabel independent berbeda</p> <p>-Waktu penelitian</p>	<p>-Ada variabel independen dan dependen sama</p> <p>-Tempat penelitian</p> <p>-Metode dan alat analisis</p> <p>-</p>
7.	Febriyanti Safdi Putri, Dr. Saparudin M. M, Si, Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE., M. Si	The Effect of Minimum Wage, Education Level and Gross Regional Domestic Product on Labor Absorption in Indonesia 2010-2019	metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data panel yang menggabungkan antara data times series dengan data cross section	X1 : Upah Minimum X2 : Tingkat Pendidikan X3 : PDRB Y : Penyerapan Tenaga Kerja	The study's findings indicate that although education level and regionally produced goods have positive and substantial effects on employment in Indonesia, the minimum wage has a favorable but negligible influence. Employment is impacted by the minimum wage, educational attainment, and gross	<p>-Variabel dependen yang digunakan berbeda</p> <p>-Waktu dan tempat penelitian berbeda</p>	<p>-ada 2 variabel independen yang sama</p> <p>-metode penelitian</p>

No	Penulis	Judul	Metode	Variabel	Hasil	Perbedaan	Persamaan
					regional product all at the same time.		
8.	Dearni Christina Purba, Purwaka Hari Prihanto, Siti Aminah	Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, IHK, PDRB terhadap Upah rata-rata Pulau Sumatera	Kuantitatif Deskriptif, analisis data panel	X1 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja X2: IHK X3: PDRB Y : Upah Rata-rata	Di Pulau Sumatera, upah rata-rata dipengaruhi secara negatif dan dapat diabaikan oleh tingkat partisipasi angkatan kerja. Di Pulau Sumatera, upah rata-rata dipengaruhi secara negatif dan tidak signifikan oleh indeks harga konsumen. Di Pulau Sumatera, produk regional bruto mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap upah rata-rata.	-Ada salah satu variabel independen yang berbeda -Tempat penelitian	-Ada beberapa variabel independen dan independen yang sama -metode penelitian
9.	Nico Candra Pratama, Maulidyah Indira Hasmarini	The Effect Of Education Level, Economic Growth, Allocation Of Government Expenditure, And The Number Of Poor People On Unemployment In Bali Province In 2017-2020	The analysis method used is the Panel Least Square (PLS)	X1 : Level Of Education X2: Economic Growth X3: Government Expenditure Allocation X4: Number of Poor People Y : Unemployment	The following conclusion may be drawn from the analysis that has been done: 1. Based on the Fixed Effect Model Test, the probability value is larger than alpha and the coefficient value (C) is 1.709951. This indicates that there is a small but favorable impact on the unemployment rate. 2. An increase in education of one thousand individuals has a beneficial influence on unemployment, with an impact of 2.76E-05. 3. In erratic economic expansion The impact of the decline, when it drops by	-Beberapa variabel dependen dan independen berbeda -Lokasi dan waktu penelitian	-Ada variabel independen yang sama -Metode penelitian

No	Penulis	Judul	Metode	Variabel	Hasil	Perbedaan	Persamaan
					<p>1%, is -0.303478, which has a negative effect on unemployment.</p> <p>4.A reduction of 3.05E-10 in government spending has a beneficial impact on unemployment when that allocation of funds drops by one mile.</p> <p>5.A reduction of 0.090735 is the result of 1% of the population becoming impoverished, and this has a favorable influence on unemployment.</p>		
10.	Dwiyana Cahyani Sara Pertiwi, Rukmini, Suprihati	The Effect Of Education Level, Accounting Training, Age Of Business And Business Scale Of Umkm Actors On The Use Of Accounting Information In Boyolali District	descriptive quantitative research, analysis method used multiple linear regression analysis with the help of SPSS program	X1 : Level of education X2 : Accounting training X3 : Age of Business X4 : Business scale Y : The Use of Accounting Information	The findings demonstrated that, either concurrently or in part, the UMKM players' business age, company scale, degree of education, and accounting training all had an impact on how accounting information was used in the Ngeplak Boyolali District. 88.8% was the result of the examination of the coefficient of determination. This suggests that the degree of education, accounting background, business age, and business scale of UMKM actors can account for variations in the variable use of accounting	-Ada beberapa variabel independen dan dependen yang berbeda -Lokasi dan waktu penelitian	-Ada salah satu variabel independen yang sama -Metode penelitian

No	Penulis	Judul	Metode	Variabel	Hasil	Perbedaan	Persamaan
					information, with additional variables outside the study model accounting for the remaining 11.2% of the variance.		

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh IHK terhadap UMP

IHK, yang dianggap sebagai indikator ekonomi yang sangat penting, dimanfaatkan guna menampilkan transformasi rata-rata tingkat harga eceran di tingkat konsumen untuk kategori barang dan jasa tertentu (Sumantri & Latifah, 2019). Dalam penyesuaian upah minimum diperlukan adanya indikator inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi.

Dalam indikator inflasi bisa kita lihat dari nilai IHK suatu daerah. Nilai IHK digunakan untuk menghitung perubahan harga barang dan jasa. Kenaikan pada IHK dapat memberikan dorongan terhadap peningkatan UMP karena biaya hidup semakin meningkat. Peningkatan biaya hidup tersebut yang nantinya dapat mendorong permintaan untuk peningkatan UMP agar pekerja dapat mengatasi inflasi serta mempertahankan daya beli. Temuan penelitian (Armidi dkk., 2018), yang menyatakan bahwa UMP dipengaruhi secara signifikan oleh IHK, mendukung hal tersebut. Hal ini menerangkan bahwa UMP Jambi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya IHK. Dengan demikian, rumusan hipotesis penelitian yang mungkin dilakukan yaitu sebagai berikut:

H₁: IHK berpengaruh signifikan terhadap UMP

2.6.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap UMP

Theodore Schultz mempresentasikan teori *human capital* pada tahun 1960 dalam pidato berjudul “*Investment in Human Capital*” (Nurkholis, 2016). Menurut konsep “*Investment in Human Capital*” *Schultz*, belajar melalui pendidikan yaitu

investasi SDM, tidak hanya kegiatan yang berorientasi pada konsumsi. Dengan meningkatkan keterampilan dan produktivitas pekerja, pendidikan sebagai alat guna meningkatkan kualitas manusia secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan.

Hal ini konsisten dengan temuan penelitian (Miswar, 2018), yang menunjukkan tingkat upah dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pendidikan seseorang. Hal ini berarti bahwa upah seseorang akan semakin bernilai jika semakin lama latar belakang pendidikannya. Jika upah seseorang meningkat maka akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan nantinya akan mendorong kenaikan upah minimum. Karena upah minimum ditinjau dari KHL. Dengan demikian, rumusan hipotesis penelitian yang mungkin dilakukan yaitu sebagai berikut:

H₂: Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap UMP

2.6.3 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap UMP

Ketika mempertimbangkan fungsi produksi neoklasik, yang mengandaikan suatu fungsi untuk menunjukkan korelasi antara input untuk tujuan faktor produksi serta output untuk tujuan konsekuensi produksi. $Q = (L, C)$ adalah bagaimana fungsi produksi ini dinyatakan. Menggunakan Q untuk mewakili output, L untuk mewakili pekerja, serta C untuk mewakili modal. Menurut fungsi produksi, peningkatan pekerja dan modal akan mendukung peningkatan output. Oleh karena itu, meningkatnya output secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan individu dan berdampak pada produk regional bruto daerah (Meinita, 2022).

Dalam penyesuaian upah salah satu indikator yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari nilai

besar kecilnya PDRB. Jika nilai PDRB semakin meningkat maka dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin kuat. Sehingga, secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat upah di suatu daerah.

Berdasarkan temuan penelitian (Charysa, 2013), UMP dipengaruhi secara signifikan oleh produk regional bruto. Artinya, kuatnya laju pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah akan mempengaruhi upah minimum yang juga akan meningkat. Dengan demikian, rumusan hipotesis penelitian yang mungkin dilakukan yaitu sebagai berikut:

H₃: PDRB berpengaruh signifikan terhadap UMP

2.6.4 Pengaruh IHK, Tingkat Pendidikan, dan PDRB terhadap UMP

Statistik yang dikenal sebagai IHK melacak perubahan biaya produk dan layanan yang dibeli masyarakat umum selama periode waktu tertentu (Tiflatul Husna dkk., 2020). IHK, yang sering dianggap sebagai metrik ekonomi penting, digunakan untuk menggambarkan pergeseran rata-rata harga eceran untuk kategori barang dan jasa tertentu di titik penjualan (Sumantri & Latifah, 2019). IHK yaitu indikator yang dimanfaatkan dalam pengukuran tingkat perubahan harga (inflasi). Hal tersebut akan mempengaruhi perubahan pada tingkat upah.

Investasi sumber daya manusia yang dapat mengupgrade standar SDM adalah pendidikan. Melalui tingkat keterampilan dan produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, pendidikan, sebagai alat untuk meningkatkan kualitas manusia, secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan (Meinita, 2022). Semakin tinggi tingkat pendidikan akan meningkatkan produktivitas dan keterampilan pada

seseorang. Dengan meningkatkan keterampilan dan produktivitas pekerja, pendidikan sebagai alat guna mengupgrade kualitas manusia secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan.

PDRB yaitu total bertambahnya nilai yang didapatkan dari semua faktor perekonomian pada suatu daerah Menurut fungsi produksi, meningkatnya tenaga kerja dan modal dapat menekan bertambahnya output. Akibatnya, bertambahnya output dapat mempengaruhi PDRB suatu daerah, yang pada nantinya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, berikut cara mengajukan hipotesis penelitian:

H4: IHK, Tingkat Pendidikan, dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap UMP

Berikut hipotesis yang diajukan pada penelitian ini berdasarkan penjelasan dari masing-masing variabel yang tercantum di atas:

H₁ : IHK berpengaruh signifikan terhadap UMP

H₂ : Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap UMP

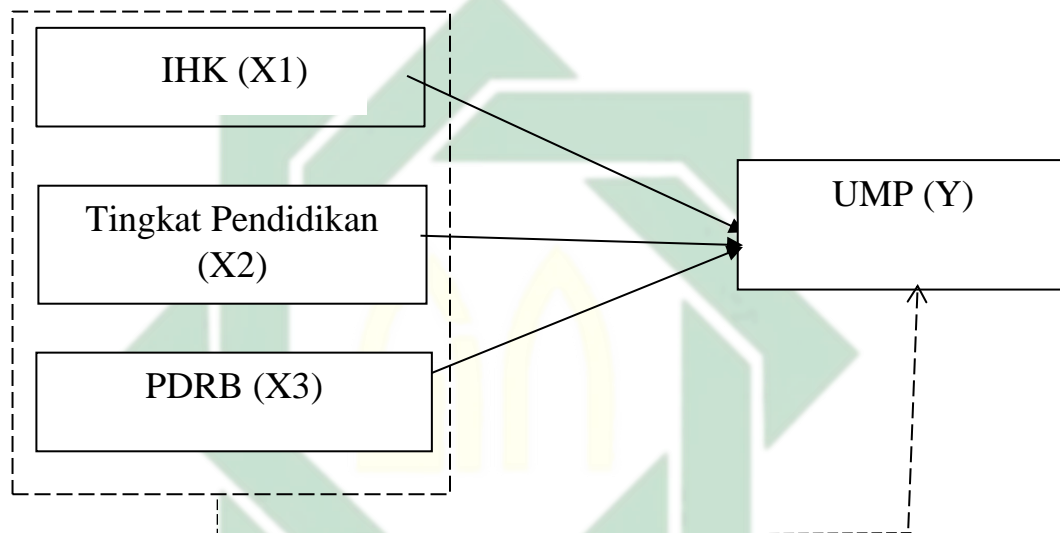
H₃ : PDRB berpengaruh signifikan terhadap UMP

H₄ : IHK, Tingkat Pendidikan, dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap UMP

2.7 Kerangka Konseptual

Tiga variabel IHK, tingkat pendidikan, dan produk regional bruto (PDRB) memiliki dampak terhadap proyeksi UMP, yang merupakan subyek kerangka konseptual studi ini. Dengan menggunakan teknik analisis regresi untuk menentukan

tingkat signifikansinya, variabel ini berfungsi sebagai variabel bebas dan UMP sebagai variabel terikat. Tingkat signifikansi variabel independen dalam menentukan UMP diperkirakan akan dihasilkan oleh temuan regresi.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

— : Secara parsial

- - - : Secara simultan

IHK dapat mempengaruhi kenaikan upah minimum provinsi. Jika IHK naik, artinya terjadi inflasi. Hal tersebut dapat mempengaruhi kekuatan daya beli konsumen dan mendorong permintaan untuk kenaikan upah.

Variabel tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat upah yang akan diberikan. Melalui tingkat keterampilan dan produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, pendidikan, sebagai alat untuk meningkatkan kualitas manusia, secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut juga dapat dijelaskan bahwa meningkatnya modal dan pekerja dapat mendukung peningkatan output, sesuai dengan fungsi produksi. Akibatnya, peningkatan output dapat berdampak pada produk regional bruto daerah dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan individu.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metodologi penelitian ini memakai penelitian kuantitatif. Teori objektif digunakan guna mengevaluasi sifat hubungan antar variabel dalam penelitian yang fokus mengkaji fenomena objektif yang akan diteliti dengan menggunakan metode kuantitatif (Musfiqon, 2012). Penelitian dengan spesifikasi kuantitatif dicirikan oleh sifatnya yang metodelis, terencana, dan terstruktur (Puguh, 2009). Metode kuantitatif merupakan ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata cara atau metode pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi terhadap hasil analisis untuk bisa memperoleh informasi untuk ditarik suatu kesimpulan dan juga pengambilan keputusan (Imam Santoso, 2021).

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ada pada Pulau Jawa yaitu meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, serta DKI Jakarta mulai dilakukan pada waktu kurang lebih pada bulan Oktober hingga Januari tahun 2023.

3.3 Variabel Penelitian

Dua kategori variabel yang dipakai pada penelitian ini yaitu variabel terikat serta variabel bebas. IHK, Tingkat Pendidikan, dan PDRB merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan upah minimum provinsi digunakan sebagai variabel terikat.

3.4 Definisi Operasional

A. Upah Minimum

Menurut teori upah minimum Cafferty (1990), upah yang lebih tinggi dan sesuai mendorong pekerja menjadi lebih produktif (Mankiw, 2006). Menurut prinsip upah minimum, jika pekerja mendapatkan cukup uang untuk menutupi kebutuhan minimum sehari-harinya untuk makan dan kebutuhan hidup lainnya. Karena itu, jika kebutuhan dasar tubuh seorang pekerja terpenuhi, secara tidak langsung mereka dapat melakukan yang terbaik. Teori upah minimum ini juga mencatat bahwa ketika menentukan upah minimum dengan memperhatikan persyaratan fisik minimum sehingga seiring waktu, orang akan mampu meningkatkan produktivitas pekerja. Nilai UMP di dapat dari hasil perhitungan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan UMP yang ada di Pulau Jawa Tahun 2013-2022 dan ditunjukkan dalam satuan rupiah.

B. Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK merupakan angka yang menunjukkan pergeseran harga barang serta jasa yang dibeli masyarakat umum dalam jangka waktu tertentu (Tiflatul Husna dkk., 2020). Selanjutnya, rata-rata perubahan harga barang dan jasa selama periode waktu tertentu dapat ditentukan dengan menggunakan IHK (Karlina, 2017). IHK dapat dihitung menggunakan rumus:

$$IHK = \frac{P_n}{P_o} \times 100\%$$

P_n merupakan harga sekarang dan P_o merupakan harga tahun dasar kemudian dikalikan dengan 100%.

C. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan, memperluas, dan membina pengetahuan dan keterampilan agar menjadi manusia dewasa yang lebih bertanggung jawab melalui proses belajar menjadi manusia yang lebih baik. orang yang dapat hidup bermasyarakat dan sehat jasmani dan rohani. Investasi sumber daya manusia yang dapat mengupgrade standar SDM adalah pendidikan. Penelitian ini menggunakan data rata-rata lama sekolah dengan satuan tahun.

D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB yaitu total bertambahnya nilai yang didapatkan dari semua faktor perekonomian pada suatu daerah. PDRB adalah total nilai barang serta jasa jadi yang didapatkan dari semua entitas ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Penelitian ini menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan satuan rupiah, dan dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{PDRB} = \text{PDBk} + \text{barang dan jasa neto dari luar daerah pada tahun dasar} - \text{pajak tidak langsung pada tahun dasar} - \text{subsidi tidak langsung pada tahun dasar}$$

Tabel 3. 1 Satuan Variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber
IHK	$IHK = \frac{Pn}{Po} \times 100\%$	Persen (%)	BPS tahun 2013-2022
Tingkat Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	BPS tahun 2013-2022
PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran $PDRB = PDBk + \text{barang dan jasa neto dari luar daerah pada tahun dasar} - \text{pajak tidak langsung pada tahun dasar} - \text{subsidi tidak langsung pada tahun dasar}$	Rupiah	BPS tahun 2013-2022
Upah Minimum Provinsi (UMP)	Penyesuaian UM = $\text{Inflasi} + (PE \times \alpha)$	Rupiah	BPS tahun 2013-2022

3.5 Jenis dan Sumber Data

Analisis data sekunder merupakan sumber data yang dipakai pada penelitian ini. Data panel, atau kombinasi data *cross section* dan *time series*, merupakan jenis data sekunder yang dipakai. dimana data cross-section terdiri dari informasi dari enam provinsi, dan data time series mencakup tahun 2013 hingga 2022. Badan Pusat Statistik merupakan sumber datanya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini melibatkan konsultasi tinjauan pustaka yang bersumber dari berbagai sumber, termasuk media cetak, catatan pemerintah, dan organisasi pusat statistik. Setelah itu, data dikumpulkan dan diperiksa dengan instrumen analisis yang berkaitan dengan subjek penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang dipakai yaitu analisis data panel dengan alat pengolah data Eviews 9. Analisis data panel menggabungkan data deret waktu dan data *cross section* (Widarjono, 2016).

Secara umum persamaan data panel pada model data panel dapat diungkapkan sebagai berikut:

$$\text{LOGY}_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \text{LOG} \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y : Upah Minimum Provinsi

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

X1 : IHK

X2 : Tingkat Pendidikan

X3 : PDRB

ε : *Error term*

t : *Time series*

i : *Cross section*

Ada beberapa cara untuk memperkirakan parameter model menggunakan data panel, antara lain:

A. *Common Effect Model (CEM)*

Metode termudah guna memperkirakan data panel adalah *Common Effect Model*, atau sering disingkat CEM. khususnya dengan mengkombinasikan data dari *cross-section* dan *time series* secara bersamaan. Dimensi waktu atau individu diabaikan dalam metode ini.

B. *Fixed Effect Model (FEM)*

Fixed Effect Model, atau disingkat FEM, adalah model yang bekerja dengan asumsi bahwa persamaan tersebut memiliki perbedaan intersep. Dengan menggunakan variabel *dummy* untuk memperhitungkan perbedaan intersep, pendekatan model FEM ini memperkirakan data panel.

C. *Random Effect Model (REM)*

Random Effect Model atau biasa disingkat dengan REM merupakan Teknik yang digunakan untuk memilih estimasi data panel yang residunya mungkin terkait satu sama lain sepanjang waktu dan antar individu.

D. Pemilihan Model

a. *Uji Chow*

Menurut (Widarjono, 2016) *uji chow* merupakan pengujian guna memilih model *fixed effect* atau *common effect* yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam *uji chow* dalam penelitian ini yaitu:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Dengan membandingkan nilai probabilitas *Chi-Square* dengan alpha 0,05,. Model fixed effect merupakan model yang paling tepat digunakan jika hasil probabilitas *Chi-Square* lebih besar ($>$) 0,05, maka (H_0) ditolak. Sebaliknya, H_0 diterima dan model common effect digunakan jika probabilitas *Chi-Square* lebih kecil ($<$) 0,05.

b. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan *random effect* atau *fixed effect*. Hipotesis yang digunakan dalam uji hausman adalah sebagai berikut :

H_0 : *Random Effect*

H_1 : *Fixed Effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol (H_0) adalah apabila nilai probabilitas $F < \alpha$ (0,05).

c. Uji *Langrange Multiple (LM)*

Pengujian ini digunakan untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan metode *random effect* atau *common effect*. Uji *Langrange Multiple (LM)* didasarkan pada distribusi *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel independen. Pengambilan keputusannya adalah jika nilai LM hitung $>$ nilai kritis *Chi-Squares* maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan hipotesis:

H_0 : *Common Effect*

H_1 : *Random Effect*

Jika LM statistik lebih besar dari *chi-square table* maka H_0 ditolak sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah *random effect*.

E. Uji Asumsi Klasik

Perlu dilakukan pengujian untuk melihat apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik sebelum melaksanakan pengujian regresi linier berganda untuk hipotesis penelitian. Hasil uji hipotesis yang baik merupakan hasil yang tidak bertentangan dengan asumsi tradisional model regresi linier berganda. Uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas merupakan beberapa asumsi tradisional dalam penelitian ini.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas yaitu sebuah prosedur yang digunakan guna menemukan apakah sebaran data pada suatu kumpulan data atau variabel berdistribusi normal atau tidak. Data yang diperoleh dapat dipakai untuk menemukan apakah berasal dari populasi normal atau berdistribusi normal dengan menggunakan Uji Normalitas. Pendekatan tradisional untuk menentukan apakah data normal tidaklah sulit. Masuk akal untuk menyimpulkan bahwa data dengan lebih dari 30 angka ($n > 30$) terdistribusi normal, berdasarkan pengalaman praktis beberapa ahli statistik.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas mencari bukti adanya keterkaitan antara variabel independen dengan model regresi. Seharusnya tidak ada korelasi apa pun antara variabel independen dalam model regresi yang layak. Pendekatan *Variance Inflation Factor* (VIF) serta Tolerance dapat dipakai guna menemukan ada tidaknya multikolinearitas. Batas toleransi model regresi normal kurang dari 1, namun batas VIF kurang dari 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji *Breusch Pagan-Godfrey* dipakai dalam analisis heteroskedastisitas penelitian ini. Uji *Breusch-Pagan-Godfrey* dipakai guna menemukan apakah suatu model menunjukkan heteroskedastisitas (Wahyu, 2015).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dipakai guna memastikan apakah kesalahan perancu pada periode t dan kesalahan pada periode sebelumnya menunjukkan adanya hubungan atau hubungan. Dengan menggunakan nilai Durbin Watson dibandingkan dengan tabel Durbin Watson (d_l dan d_u), temukan autokorelasi. Jika $d_u < dw$ atau $dw < 4-d_u$, maka autokorelasi tidak terjadi.

3.8 Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan sementara, yang kebenarannya harus dikonfirmasi berdasarkan informasi latar belakang dan rumusan masalah yang disajikan selama pembuatan kerangka konseptual penelitian. Uji hipotesis berikut dijalankan dalam penelitian ini:

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Besar kecilnya andil setiap variabel independen terhadap penjelasan variabel dependen ditentukan dengan uji parsial. H_0 ditolak dan H_1 diterima jika signifikansinya kurang dari atau sama dengan $\alpha 0,05$, atau jika T_{hitung} lebih dari atau sama dengan T_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, begitu pula sebaliknya.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara kolektif dinilai dengan menggunakan uji F; jika signifikansinya kurang dari atau sama dengan $\alpha 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, begitu pula sebaliknya; apabila F_{hitung} lebih besar atau sama dengan F_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, begitu pula sebaliknya.

3.9 Koefisien Determinasi

Persentase pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen disebut juga koefisien determinasi, dan mencirikan varians pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R-square atau Adjusted R-square yang disesuaikan dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan mengukur nilai koefisien determinasi ini. Jika hanya ada satu variabel independen maka nilai R-Square dapat digunakan; jika terdapat dua atau lebih variabel bebas maka dapat digunakan Adjusted R-Square. Jika mendekati angka satu pada persamaan regresi maka mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat dan seluruh variabel bebas. Sebaliknya semua faktor independen yang mempengaruhi variabel dependen sedikit dipengaruhi oleh nilai koefisien determinasi pada persamaan regresi yang

mendekati nol. Besarnya determinasi parsial (R^2) secara parsial menunjukkan besarnya pengaruh terhadap variabel independen.



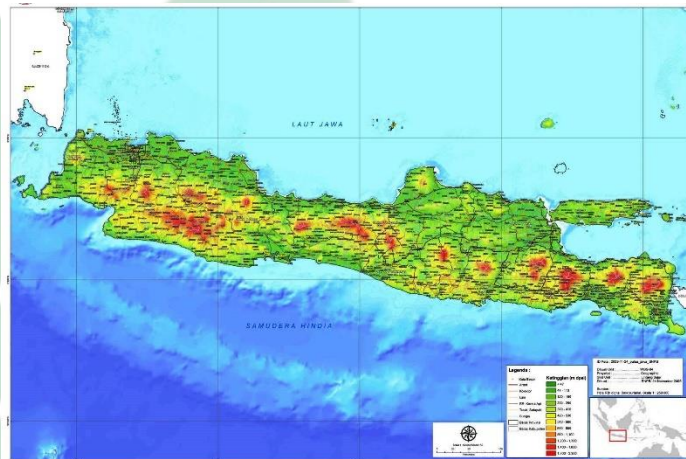
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Pulau Jawa



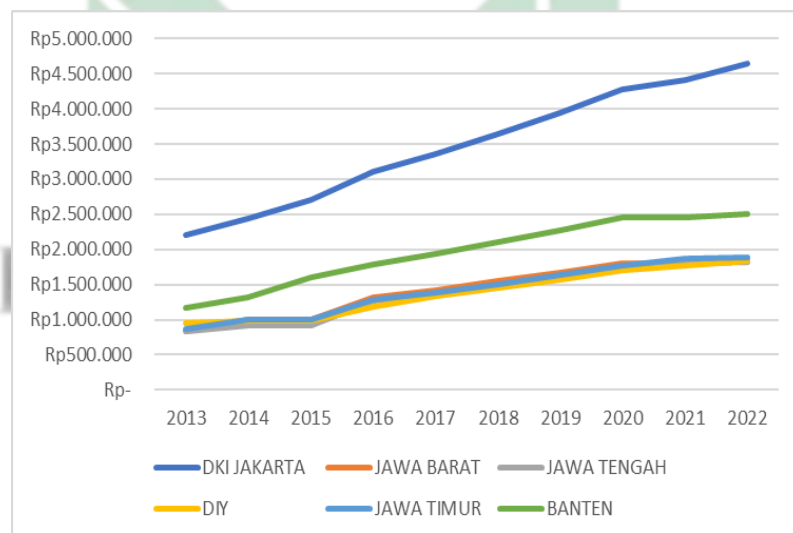
Gambar 4. 1 Peta Pulau Jawa

Pulau Jawa menduduki urutan pertama sebagai wilayah yang memiliki jumlah penduduk paling banyak serta pusat ekonomi nasional Indonesia. Pulau Jawa memiliki luas wilayah sekitar 129.442 km². Pulau ini merupakan pulau terbesar di Indonesia serta memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Karena, Pulau Jawa dihuni oleh 151,6 juta jiwa atau lebih dari setengah populasi Indonesia. Pulau Jawa memiliki 6 provinsi yang didalamnya terdapat 119 kabupaten dan kota. Dari total 119 kabupaten dan kota, terdapat 85 kabupaten dan 34 kota. Enam provinsi tersebut diantaranya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Secara astronomis, Pulau Jawa terletak diantara 7°50'10" - 7°56'41" Lintang Selatan (LS) dan 113°48'10" - 113°48'26" Bujur Timur (BT). Wilayah Pulau Jawa bagian utara berbatasan

dengan Laut Jawa, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, bagian timur berbatasan dengan Selat Bali, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Sunda .

4.1.2 Kondisi UMP Pulau Jawa

Upah minimum provinsi atau UMP suatu provinsi adalah besaran yang berlaku di seluruh kota dan kabupaten. Usulan dewan pengupahan provinsi menjadi dasar pengambilan keputusan gubernur. Perhitungan UMP didasarkan pada kebutuhan pokok bulanan pekerja di suatu lokasi, dan memperhitungkan variasi biaya hidup di seluruh provinsi (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, 2018).



Sumber : Badan Pusat Statistik (2013-2022)

Gambar 4. 2 Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013-2022

Pada gambar 4.2 menunjukkan bahwasanya UMP di Pulau Jawa bergerak naik atau meningkat di setiap tahunnya dari tahun 2013 hingga 2022. Provinsi DKI Jakarta menduduki UMP tertinggi di Pulau Jawa, kemudian Provinsi Banten

menduduki urutan kedua, urutan selanjutnya yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY

Tabel 4. 1 Perkembangan UMP di Pulau Jawa Tahun 2013-2022

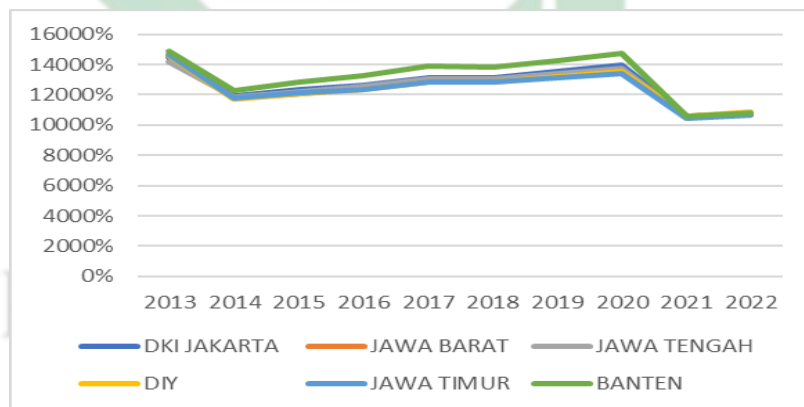
Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2013	Rp 2.200.000,00	Rp 850.000,00	Rp 830.000,00	Rp 947.114,00	Rp 866.250,00	Rp 1.170.000,00
2014	Rp 2.441.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 910.000,00	Rp 988.500,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.325.000,00
2015	Rp 2.700.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 910.000,00	Rp 988.500,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.600.000,00
2016	Rp 3.100.000,00	Rp 1.312.000,00	Rp 1.265.000,00	Rp 1.182.510,00	Rp 1.283.000,00	Rp 1.784.000,00
2017	Rp 3.355.750,00	Rp 1.420.624,00	Rp 1.367.000,00	Rp 1.337.645,00	Rp 1.388.000,00	Rp 1.931.180,00
2018	Rp 3.648.036,00	Rp 1.544.361,00	Rp 1.486.065,00	Rp 1.454.154,00	Rp 1.508.895,00	Rp 2.099.385,00
2019	Rp 3.940.973,00	Rp 1.668.373,00	Rp 1.605.396,00	Rp 1.570.923,00	Rp 1.630.059,00	Rp 2.267.991,00
2020	Rp 4.276.350,00	Rp 1.810.351,00	Rp 1.742.015,00	Rp 1.704.608,00	Rp 1.768.777,00	Rp 2.460.997,00
2021	Rp 4.416.187,00	Rp 1.810.351,00	Rp 1.798.979,00	Rp 1.765.000,00	Rp 1.868.777,00	Rp 2.460.997,00
2022	Rp 4.641.854,00	Rp 1.841.487,00	Rp 1.812.935,00	Rp 1.840.916,00	Rp 1.891.567,00	Rp 2.501.203,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (2013-2022)

Provinsi DKI Jakarta menduduki tingkat UMP paling tinggi diantara provinsi yang lain di Pulau Jawa. UMP Provinsi DKI Jakarta tumbuh sebesar 111% yang awalnya sebesar Rp 2.200.000,00 pada tahun 2013, naik sebesar Rp 4.641.854,00 pada tahun 2022, Kenaikan UMP juga diikuti oleh masing-masing provinsi di Pulau Jawa. Provinsi Banten naik sebesar 114%, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur sebesar 118%, Provinsi Jawa Barat sebesar 117%, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 94%.

4.1.3 Kondisi IHK Pulau Jawa

Total biaya produk dan jasa yang dibeli konsumen diukur dengan IHK. Pemerintah menggunakan IHK sebagai indikasi inflasi dan untuk melacak perubahan biaya hidup dari waktu ke waktu. Selain menghitung rata-rata perubahan harga suatu produk dan jasa yang sering dikonsumsi masyarakat umum, IHK juga diperhitungkan dalam menentukan seberapa besar perubahan nilai kontrak, tunjangan kompensasi karyawan, dan upah. Berdasarkan tren konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di 90 kota pada tahun dasar 2018, IHK dihitung (Badan Pusat Statistik, 2022).



Sumber : Badan Pusat Statistik (2013-2022)

Gambar 4. 3 Indeks Harga Konsumen di Pulau Jawa Tahun 2013-2022

Gambar 4.3 menunjukkan pergerakan nilai IHK yang berfluktuasi dari tahun 2013 hingga 2022. Provinsi Banten menduduki urutan pertama di Pulau Jawa. Kemudian DKI Jakarta menduduki urutan kedua, dan selanjutnya diikuti oleh Provinsi DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di tahun 2022 nilai IHK

Provinsi DKI Jakarta sebesar 107,58%, Jawa Barat 107,46%, Jawa Tengah 107,06%, DIY 108,53%, Jawa Timur 106,86%, dan Banten 108,19%.

Tabel 4. 2 Perkembangan IHK Pulau Jawa Tahun 2013-2022

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2013	144,27	145,87	141,90	145,65	146,50	148,87
2014	119,41	117,93	118,83	116,84	118,00	122,94
2015	123,35	120,96	122,30	120,45	121,01	128,22
2016	126,27	124,21	125,29	123,21	123,57	132,54
2017	130,97	129,06	130,16	128,39	128,15	138,68
2018	130,97	129,06	130,16	128,39	128,15	138,07
2019	135,25	133,22	133,98	131,81	131,47	142,35
2020	139,62	136,92	137,53	135,46	134,19	147,23
2021	105,96	105,69	105,09	106,10	104,75	106,06
2022	107,58	107,46	107,06	108,53	106,86	108,19

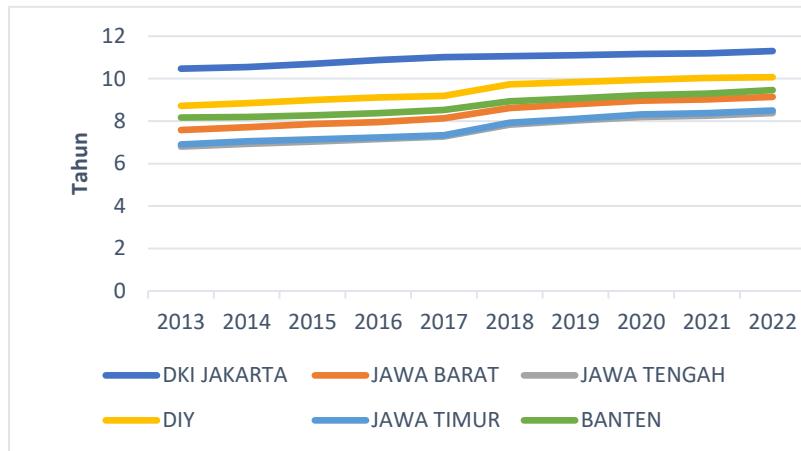
Sumber : Badan Pusat Statistik (2013-2022)

Berdasarkan tabel 4.2 pada tahun 2020 IHK tertinggi terjadi di Provinsi Banten, yaitu sebesar 147,23 dan pada tahun berikutnya menurun sebesar 106,06. Menurunnya nilai IHK terjadi pada beberapa provinsi yang lain, dikarenakan pada tahun 2021 terjadi inflasi yang rendah yaitu sebesar 1,56% (yoy) yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Terjadinya inflasi yang rendah dipengaruhi oleh belum kuatnya permintaan domestik seiring dengan kebijakan pembatasan mobilitas yang harus dijalankan guna pencegahan penyebaran Covid-19 di tengah pengaruh tekanan harga global ke domestik yang minimal.

4.1.4 Kondisi Tingkat Pendidikan Pulau Jawa

Dalam penentuan upah selain indikator IHK, tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam penentuan upah. Untuk melihat kemampuan seseorang, tingkat pendidikan menjadi ukuran dalam melihat

kemampuan seseorang dan juga efisiensi dan efektifitas dalam menyelesaikan pekerjaannya (Meinita, 2022).



Sumber : Badan Pusat Statistik (2013-2022)

Gambar 4. 4 Rata-Rata Lama Sekolah di Pulau Jawa Tahun 2013-2022

Jika dilihat dari gambar 4.4 rata-rata lama sekolah provinsi yang ada di Pulau Jawa meningkat dari tahun ke tahun. Meningkat dalam arti penduduk di Pulau Jawa menyelesaikan atau menempuh pendidikan formal lebih lama. Hal tersebut didukung dengan adanya fasilitas serta teknologi yang semakin canggih serta sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar.

Tabel 4. 3 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Pulau Jawa Tahun 2013-2022

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2013	10,47	7,58	6,80	8,72	6,90	8,17
2014	10,54	7,71	6,93	8,84	7,05	8,19
2015	10,70	7,86	7,03	9,00	7,14	8,27
2016	10,88	7,95	7,15	9,12	7,23	8,37
2017	11,02	8,14	7,27	9,19	7,34	8,53
2018	11,06	8,61	7,84	9,73	7,93	8,93
2019	11,11	8,79	8,03	9,83	8,11	9,07
2020	11,17	8,96	8,19	9,95	8,31	9,22
2021	11,20	9,03	8,26	10,04	8,37	9,29

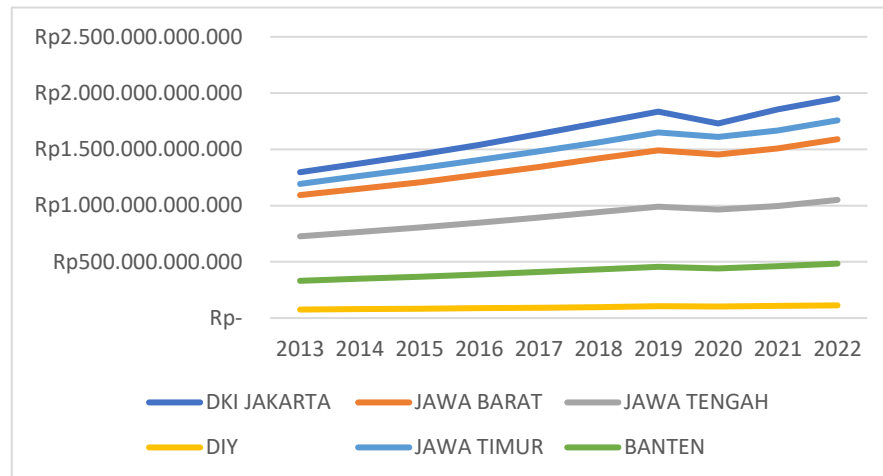
Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2022	11,30	9,14	8,38	10,07	8,50	9,46

Sumber : Badan Pusat Statistik (2013-2022)

Setiap tahunnya, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Pulau Jawa untuk bersekolah meningkat. Provinsi DKI Jakarta memiliki pangsa sebesar 10,47 tahun pada tahun 2013 dan 11,30 tahun pada tahun 2022. Di Provinsi DKI Jakarta, rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 8% antara tahun 2013 dan 2022. Provinsi lain di pulau Jawa juga mengalami perluasan pada periode ini, dengan Provinsi Jawa Barat berkembang sebesar 21%, Jawa Tengah sebesar 23%, DIY sebesar 15%, Jawa Timur sebesar 23%, dan Banten sebesar 16%.

4.1.5 Kondisi PDRB di Pulau Jawa

Sistem pengupahan tenaga kerja tergantung dengan output yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Jika output yang dihasilkan oleh tenaga kerja semakin banyak, maka PDRB juga akan meningkat. PDRB merupakan total nilai tambah dari barang maupun jasa yang didapatkan dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Dalam proses produksi di suatu wilayah dapat kita lihat dari adanya kenaikan dan penurunan pada nilai PDRB (Kyswantoro, 2017).



Sumber : Badan Pusat Statistik (2013-2022)

Gambar 4. 5 PDRB di Pulau Jawa Tahun 2013-2022

Gambar 4.5 menunjukkan bahwasanya PDRB di Pulau Jawa pada tahun 2013-2022 bergerak secara fluktuatif. Dimana terjadi penurunan nilai PDRB di tahun 2020 yang disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia kehilangan nilai ekonomi sebesar Rp 1.356 triliun atau 8,8% dari PDB. Selain nilai ekonomi yang hilang, pandemi Covid-19 juga berdampak signifikan pada kesehatan APBN. Pada tahun 2020, defisit APBN melonjak lebih dari 3%, yakni mencapai 6,09% atau sebesar Rp 956 triliun. Tabel 4. 4 Perkembangan PDRB di Pulau Jawa Tahun 2013-2022 (Rupiah)

Tabel 4. 4 Perkembangan PDRB di Pulau Jawa Tahun 2013-2022 (Rupiah)

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2013	1.296.694.573.470,00	1.093.543.545.870,00	726.655.118.060,00	75.627.449.590,00	1.192.789.801.810,00	331.099.105.500,00
2014	1.373.389.129.110,00	1.149.216.057.050,00	764.959.150.950,00	79.536.081.750,00	1.262.684.495.070,00	349.351.227.660,00

2015	1.454.563. 847.380,00	1.207.232. 341.560,00	806.765.09 2.170,00	83.474.451 .550,00	1.331.376. 098.900,00	368.377.20 3.020,00
2016	1.539.916. 881.030,00	1.275.619. 241.160,00	849.099.35 4.690,00	87.685.809 .610,00	1.405.563. 511.020,00	387.835.08 9.450,00
2017	1.635.359. 147.340,00	1.343.662. 141.830,00	893.750.29 6.170,00	92.300.243 .890,00	1.482.299. 576.830,00	410.136.99 8.420,00
2018	1.735.208. 291.060,00	1.419.624. 140.040,00	941.091.14 3.860,00	98.024.014 .330,00	1.563.441. 824.560,00	433.782.71 4.150,00
2019	1.836.240. 549.510,00	1.490.959. 687.100,00	991.516.54 3.310,00	104.485.45 8.810,00	1.649.895. 641.460,00	456.620.03 4.950,00
2020	1.729.291. 087.190,00	1.453.380. 722.840,00	965.227.26 9.210,00	101.698.52 0.170,00	1.611.392. 546.770,00	441.148.57 7.280,00
2021	1.856.075. 823.570,00	1.507.746. 390.140,00	997.345.05 1.890,00	107.372.56 0.330,00	1.668.749. 444.870,00	460.963.02 3.640,00
2022	1.953.455. 853.410,00	1.589.984. 926.310,00	1.050.322. 126.930,00	112.898.32 3.170,00	1.757.821. 433.390,00	484.141.82 9.550,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (2013-2022)

Tabel 4.4 merupakan data PDRB di Pulau Jawa pada tahun 2013 hingga 2022. Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki PDRB terendah dari tahun ke tahun, yaitu sebesar Rp 75.627.449.590,00 pada tahun 2013 dan pada tahun 2022 sebesar Rp 112.898.323.170,00 dengan persentase pertumbuhan sebesar 49%. Provinsi DKI Jakarta menduduki PDRB tertinggi se Pulau Jawa yaitu sebesar Rp1.296.694.573.470,00 pada tahun 2013 dan pada tahun 2022 sebesar Rp 1.953.455.853.410,00 dengan persentase pertumbuhan sebesar 51%.

4.2 Hasil dan Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Spesifikasi Model

a. Uji Chow

Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk menentukan spesifikasi model pada data panel yaitu dengan cara melakukan *uji chow* dengan menggunakan

spesifikasi model fixed. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menemukan model manakah yang dirasa cocok untuk digunakan apakah *common effect model* atau *fixed effect model*. Dengan perumusan jika probabilitas *Chi-Square* mempunyai nilai yang lebih kecil dari 0,05 dengan arti H_1 diterima dan H_0 ditolak. Maka model yang paling cocok untuk digunakan yakni fixed effect model. Berlaku juga sebaliknya, jika *Chi-Square* mempunyai nilai yang lebih besar dari 0,05 maka mempunyai arti bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima, yang berarti model yang cocok digunakan adalah *common effect model*.

Keterangan:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	13.771528	(9,47)	0.0000
Cross-section Chi-square	77.471218	9	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9 (2023)

Menurut hasil *uji chow* yang diperoleh pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwasannya nilai *Cross-section Chi-square* yakni sebesar 0,0000 lebih kecil dari pada 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat diambil kesimpulan bahwa estimasi model yang paling tepat digunakan yaitu *Fixed Effect Model*, untuk itu

perlu dilakukan pengujian lanjut dengan melakukan uji hausman (Gujarati et.al, 2009).

b. Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk mengetahui apakah *Random Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang paling tepat. Dengan perumusan jika probabilitas *Chi-square* mempunyai nilai yang lebih kecil dari 0,05 dengan arti H_1 diterima dan H_0 ditolak. Maka model yang paling cocok untuk digunakan yakni *Fixed Effect Model*. Berlaku juga sebaliknya, jika *Chi-square* mempunyai nilai yang lebih besar dari 0,05 maka mempunyai arti bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima, yang berarti model yang cocok digunakan adalah *Random Effect Model*.

Keterangan:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	89.630061	3	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9 (2023)

Menurut hasil uji hausman yang diperoleh pada tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa nilai *Probability Cross-section* random yakni sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat diambil kesimpulan bahwa estimasi

model yang paling tepat digunakan yakni *Fixed Effect Model*, dan untuk pengujian dapat dikatakan selesai tanpa perlu melakukan uji *Langrange Multiplier*.

4.2.2 Model Regresi Data Panel

Dalam analisis dengan menggunakan regresi data panel terdapat tiga model yang biasa digunakan untuk melakukan analisis untuk estimasi hasil. Tiga model yang digunakan tersebut meliputi *Model Common Effect*, *Model Fixed Effect*, dan *Model Random Effect*. Dari ketiga model tersebut salah satu yang nantinya akan terpilih sebagai model yang terbaik dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh setiap variabel bebas dan variabel terikat.

Tabel 4. 7 *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: LOGY				
Method: Panel Least Squares				
Date: 01/06/24 Time: 03:09				
Sample: 1 60				
Periods included: 6				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.908288	0.719955	5.428519	0.0000
X1	0.033061	0.004690	7.048947	0.0000
X2	0.248449	0.011674	21.28133	0.0000
LOGX3	0.148998	0.013306	11.19778	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.954899	Mean dependent var	14.32632	
Adjusted R-squared	0.943383	S.D. dependent var	0.431916	
S.E. of regression	0.102771	Akaike info criterion	-1.523486	
Sum squared resid	0.496411	Schwarz criterion	-1.069711	
Log likelihood	58.70458	Hannan-Quinn criter.	-1.345990	
F-statistic	82.92458	Durbin-Watson stat	3.038348	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Pengolahan Eviews9 (2023)

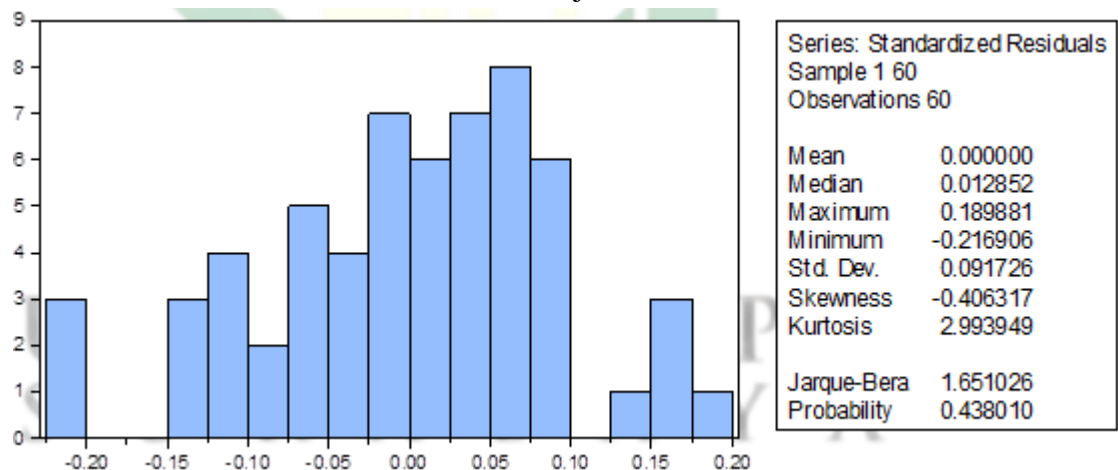
Tabel di atas merupakan model yang terpilih setelah melewati Uji Chow dan Uji Hausman. Dari kedua hasil uji tersebut, model yang terbaik yaitu *Fixed Effect Model* sehingga model tersebut yang digunakan dalam uji selanjutnya.

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji variabel bebas dan variabel terikat apakah mempunyai nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Berikut ini hasil pengujian normalitas pada penelitian ini yakni:

Gambar 4. 6 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Pengolahan Eviews9 (2023)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari gambar 4.5 menunjukkan bahwa nilai probability mempunyai nilai sebesar 0,438010 lebih besar dari 0,05 yang berarti data dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal, maka pengujian lebih lanjut asumsi regresi dapat dilakukan.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan guna mendeteksi serta mengetahui apakah didalam suatu model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas satu dengan variabel bebas yang lainnya. Jika diantara variabel bebas satu dengan yang lain terdapat adanya korelasi yang cukup tinggi biasanya terjadi di atas 0,90, maka variabel tersebut terdeteksi adanya gangguan multikolinieritas. Dan juga sebaliknya jika variabel independen mempunyai nilai yang lebih kecil dari 0,90 maka model tersebut bebas dari permasalahan multikolinieritas. Berikut merupakan hasil uji multikolinieritas:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	LOGX3
X1	1,000000	-0,114843	-0,069836
X2	-0,114843	1,000000	-0,068414
LOGX3	-0,069836	-0,068414	1,000000

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews9 (2023)

Dilihat dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil koefisiensi dari variabel bebas yaitu sebesar -0,114843, dan -0,069836. Ketiga variabel bebas tersebut memiliki nilai koefisien di bawah 0,90 yang berarti variabel bebas dalam penelitian ini lolos uji multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui serta mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual antar pengamatan. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.166995	0.220748	-0.756496	0.4525
X1	-0.000913	0.000573	-1.593398	0.1167
X2	-0.003058	0.005691	-0.537290	0.5932
LOGX3	0.013954	0.007002	1.992813	0.0512

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews9 (2023)

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 4.9 bahwa probabilitas masing-masing variabel independent IHK adalah 0,1167 tingkat pendidikan adalah 0,5932, dan PDRB adalah 0,0512. Dari ketiga variabel tersebut menunjukkan hasil lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi diantara residual pada periode t dengan residual pada periode t-1 atau sebelumnya. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi:

Tabel 4. 10 Hasil Uji Autokorelasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.954899	Mean dependent var	14.32632
Adjusted R-squared	0.943383	S.D. dependent var	0.431916
S.E. of regression	0.102771	Akaike info criterion	-1.523486
Sum squared resid	0.496411	Schwarz criterion	-1.069711
Log likelihood	58.70458	Hannan-Quinn criter.	-1.345990
F-statistic	82.92458	Durbin-Watson stat	3.038348
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews9 (2023)

Dapat dilihat dari hasil uji autokorelasi pada tabel 4.10 diperoleh nilai DW (*Durbin Watson*) yaitu sebesar 3,038348 dengan jumlah data 60 serta jumlah variabel independent (k)=3. Langkah selanjutnya yaitu dilihat dalam tabel DW

dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 didapatkan hasil nilai DL sebesar 1,4797 dan DU sebesar 1,6889. Karena nilai DU lebih kecil dari nilai DW dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.2.4 Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan dengan analisis regresi data panel yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model yang cocok digunakan dalam penelitian ini yakni Fixed Effect Model dengan persamaan regresi yakni sebagai berikut:

$$\text{LOGY} = 3,908288 + 0,033061X_1 + 0,248449X_2 + 0,148998\text{LOGX}_3$$

Keterangan:

- 1) Nilai koefisien β_0 sebesar 3,908288, hal ini berarti IHK, tingkat pendidikan, dan PDRB memiliki nilai sebesar 0, maka UMP akan memperoleh sebesar 3,908288.
- 2) Nilai koefisien β_1 sebesar 0,033061, hal tersebut menunjukkan apabila IHK bertambah sebesar 1 persen, maka akan menghasilkan kenaikan UMP sebesar 0,033061.
- 3) Nilai koefisien β_2 sebesar 0,248449, hal tersebut menunjukkan apabila tingkat pendidikan bertambah sebesar 1 tahun, maka akan menghasilkan kenaikan UMP sebesar 0,248449..

- 4) Nilai koefisien β_3 sebesar 0,148998, hal tersebut menunjukkan apabila tingkat pendidikan bertambah sebesar 1 persen, maka akan menghasilkan kenaikan UMP sebesar 0,148998.

4.2.5 Hasil Uji Statistik

a. Uji Statistik F (Simultan)

Uji F memiliki peran guna menjelaskan apakah seluruh variabel independen memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Untuk pengaruh dari semua variabel independen terhadap variabel dependen yakni dapat dilihat pada nilai uji statistik F. Nilai probabilitas (F-statistik) dapat dikatakan signifikan apabila memiliki nilai yang lebih kecil dari 0,05 serta dapat dinyatakan bahwa variabel independen dapat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dan berlaku sebaliknya jika nilai probabilitas (F-statistik) mempunyai nilai yang lebih besar dari signifikansi 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil dari Uji F yakni:

Tabel 4. 11 Hasil Uji F

R-squared	0.954899
Adjusted R-squared	0.943383
S.E. of regression	0.102771
Sum squared resid	0.496411
Log likelihood	58.70458
F-statistic	82.92458
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews9

Berdasarkan hasil uji F di atas, ditunjukkan nilai F statistik sebesar 82,92458 dengan koefisien bertanda positif serta nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu variabel IHK, tingkat pendidikan, dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel UMP di Pulau Jawa Tahun 2013-2022.

b. Uji Statistik T (Parsial)

Uji T adalah uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui serta melihat sejauh mana hubungan antara variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Nilai probabilitas dapat dikatakan signifikan apabila memiliki nilai yang lebih kecil dari 0,05 serta dapat dinyatakan bahwa variabel independen dapat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini juga berlaku sebaliknya apabila nilai probabilitas memiliki nilai yang lebih besar dari signifikansi 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil dari uji T:

Tabel 4. 12 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.908288	0.630738	9.459987	0.0000
X1	0.033061	0.004690	7.048947	0.0000
X2	0.248449	0.011674	21.28133	0.0000
LOGX3	0.148998	0.013306	11.19778	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews9 (2023)

a) IHK (X1)

Dari hasil uji parsial menunjukkan hasil bahwa variabel IHK merupakan variabel X1 dengan nilai statistik t sebesar 7,048947 dengan koefisien positif serta nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti variabel IHK sebagai X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel UMP di Pulau Jawa tahun 2013-2022.

b) Tingkat Pendidikan (X2)

Dari hasil uji parsial menunjukkan hasil bahwa variabel tingkat pendidikan merupakan variabel X2 dengan nilai statistik t sebesar 21,28113 dengan koefisien positif serta nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti variabel tingkat pendidikan sebagai X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel UMP di Pulau Jawa tahun 2013-2022.

c) PDRB (X3)

Dari hasil uji parsial menunjukkan hasil bahwa variabel PDRB merupakan variabel X3 dengan nilai statistik t sebesar 11,19778 dengan koefisien positif serta nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti variabel PDRB sebagai X3 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel UMP di Pulau Jawa tahun 2013-2022.

4.2.6 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi salah satu fungsinya adalah untuk mengkarakterisasi perbedaan derajat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Berikut hasil uji koefisien determinasi R^2 :

Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.954899	Mean dependent var	14.32632
Adjusted R-squared	0.943383	S.D. dependent var	0.431916
S.E. of regression	0.102771	Akaike info criterion	-1.523486
Sum squared resid	0.496411	Schwarz criterion	-1.069711
Log likelihood	58.70458	Hannan-Quinn criter.	-1.345990
F-statistic	82.92458	Durbin-Watson stat	3.038348
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews9 (2023)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas bahwasanya nilai R-Square sebesar 0,954899 dan nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,943383, maka hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kontribusi variabel IHK, tingkat pendidikan, dan PDRB terhadap UMP di Pulau Jawa Tahun 2013-2022 yakni sebesar 94,34% dan sisanya 5,66% dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh IHK, Tingkat Pendidikan, dan PDRB terhadap UMP di Pulau Jawa

Perolehan analisis regresi didapatkan F-statistik 82,92458 bersama angka probabilitas uji F $0,000000 < 0,05$, bahwa regresi tersebut menyatakan bahwasanya secara simultan variabel IHK (X1), tingkat pendidikan (X2), dan PDRB (X3) berpengaruh signifikan terhadap UMP (Y) di Pulau Jawa Tahun 2013-2022. Hal ini menandakan secara bersama-sama variabel IHK, tingkat pendidikan, dan PDRB memiliki pengaruh terhadap UMP.

Dari hasil tersebut diketahui bahwa variabel-variabel saling berkaitan serta memberikan kontribusi dalam penentuan UMP. Kenaikan pada IHK dapat

memberikan dorongan terhadap peningkatan UMP karena biaya hidup yang semakin meningkat. Peningkatan biaya hidup tersebut yang nantinya dapat mendorong permintaan untuk peningkatan UMP agar pekerja dapat mengatasi inflasi serta mempertahankan daya beli. Hal tersebut didukung dengan data IHK di Pulau Jawa yang bergerak secara fluktuatif mengikuti tingkat inflasi serta perubahan pada biaya hidup masyarakat.

Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda khususnya di Wilayah Jawa serta Luar Jawa, sehingga perbedaan tersebut menimbulkan ketimpangan dalam penentuan UMP oleh pemerintah. Keadaan ini dikarenakan Wilayah Jawa merupakan sentral aktivitas perekonomian, Wilayah Jawa akan bereaksi terhadap situasi ini sesegera mungkin, mengingat ketersediaan informasi yang cepat dan kehadiran pekerja.

Sedangkan di Wilayah Luar Jawa pekerja yang timpang serta informasi yang berkembang tidak secepat yang ada di Wilayah Jawa menjadikan peningkatan upah tidak terlalu cepat menanggapi suatu gejolak yang berlangsung di Indonesia. Penyebaran tenaga kerja yang tidak merata serta kondisi geografis dan ekonomi di beberapa wilayah Indonesia menimbulkan para pekerja berpindah dari wilayah bermukim ke tempat yang menjadi sentral aktivitas perekonomian guna kesejahteraannya. Dalam hal tersebut upah berpengaruh sebab upah dimanfaatkan untuk tujuan memenuhi kebutuhan (Wulansari et al., 2014).

Tingkat PDRB di Pulau Jawa yang bergerak positif naik dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Sehingga, PDRB yang tinggi dapat mendukung

investasi dalam pendidikan serta menciptakan kesempatan untuk pendidikan yang lebih baik. Tingkat pendidikan di Pulau Jawa yang terus meningkat dapat memperkuat keterampilan tenaga kerja dan produktivitas pekerja, sehingga berdampak positif pada penentuan upah.

Riset ini sejalan dengan riset yang dibuat oleh (Meinita, 2022) dengan judul riset “Pengaruh Inflasi, Tingkat Pendidikan, dan PDRB terhadap UMP” yang menunjukkan hasil penelitian secara simultan mempunyai hubungan dan signifikan terhadap UMP dengan koefisien determinasi 0,978243 yang artinya variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 97,82%.

4.3.2 Pengaruh IHK terhadap UMP di Pulau Jawa

Hasil uji t menunjukkan angka t-statistik 7,048947 dengan angka probabilitas $0,0000 < 0,05$, bahwa regresi tersebut menyatakan bahwasanya secara parsial variabel IHK (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap UMP di Pulau Jawa. Koefisien regresi IHK sebesar 0,033061 dengan tanda positif menerangkan setiap kenaikan 1 persen total IHK, maka dapat menaikkan UMP di Pulau Jawa sebesar 0,033061 persen. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya IHK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap UMP di Pulau Jawa Tahun 2013-2022.

IHK dapat menggambarkan perubahan pada harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini selaras dengan yang dikatakan (Mankiw, 2006) “Harga merupakan tingkat dimana uang yang digunakan untuk mendapatkan barang dan jasa. Peningkatan dalam seluruh tingkat harga disebut inflasi”. Peningkatan pada IHK menunjukkan bahwasanya biaya hidup juga naik. Kenaikan biaya hidup

dapat menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan upah. Para pekerja memerlukan upah yang semakin tinggi karena keperluan dasar mereka yang harus terpenuhi.

Tabel 4. 14 Tingkat Inflasi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2017

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2015	3,30	2,73	2,73	3,09	3,08	4,29
2016	2,37	2,75	2,36	2,29	2,72	2,94
2017	3,72	3,63	3,71	4,20	4,04	3,98

Sumber : Badan Pusat Statistik (2015-2017)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwasanya tingkat inflasi bergerak secara fluktuatif. Salah satu laju inflasi tertinggi terjadi di provinsi Banten pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,29% sedangkan inflasi terendah terjadi di provinsi DIY pada tahun 2016 sebesar 2,29%. Inflasi adalah salah sebuah permasalahan yang penting pada perekonomian. Tingkat inflasi yang tinggi dan rendah dapat disebabkan oleh daya beli masyarakat itu sendiri, yang mencerminkan kondisi keseimbangan pasar yaitu permintaan serta penawaran. Apabila jumlah penawaran barang di pasar berlebih atau sebaliknya maka kondisi ketidakseimbangan akan terjadi, yang akhirnya memicu terjadinya inflasi.

Salah satu instrumen dalam perhitungan inflasi yaitu IHK. IHK bervariasi secara berkala untuk menunjukkan seberapa cepat barang dan jasa tumbuh (inflasi) atau menurun (deflasi) (Badan Pusat Statistik, 2022). Jika dilihat dari tabel di atas menunjukkan pada tahun 2016-2017 provinsi yang ada di Pulau Jawa tingkat

inflasinya bergerak naik. Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 menunjukkan nilai tingkat inflasi sebesar 2,37% dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,72%. Hal tersebut juga diikuti oleh nilai IHK pada tahun 2016-2017 pada tabel di bawah ini. Sehingga, dapat disimpulkan bahwasanya sesuai dengan teori jika nilai IHK naik maka tingkat inflasi juga akan naik.

Tabel 4. 15 IHK di Pulau Jawa Tahun 2013-2022

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2013	144,27	145,87	141,90	145,65	146,50	148,87
2014	119,41	117,93	118,83	116,84	118,00	122,94
2015	123,35	120,96	122,30	120,45	121,01	128,22
2016	126,27	124,21	125,29	123,21	123,57	132,54
2017	130,97	129,06	130,16	128,39	128,15	138,68
2018	130,97	129,06	130,16	128,39	128,15	138,07
2019	135,25	133,22	133,98	131,81	131,47	142,35
2020	139,62	136,92	137,53	135,46	134,19	147,23
2021	105,96	105,69	105,09	106,10	104,75	106,06
2022	107,58	107,46	107,06	108,53	106,86	108,19

Sumber : Badan Pusat Statistik (2013-2022)

IHK Pulau Jawa dalam periode 2013-2022 bergerak secara fluktuatif, dimana pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan. Penurunan IHK ini dialami oleh seluruh provinsi khususnya yang berada di Pulau Jawa. Menurunnya nilai IHK pada tahun 2021 disebabkan oleh terjadinya deflasi dipengaruhi karena permintaan domestik yang masih melemah seiring dengan regulasi pembatasan

mobilitas yang harus dijalankan guna pencegahan penyebaran Covid-19 di tengah pengaruh tekanan harga global ke domestik yang lebih kecil.

Naik turunnya nilai IHK dapat digunakan sebagai pengukuran kondisi perekonomian suatu daerah. IHK yang menurun dapat menyebabkan deflasi, yang nantinya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam memulihkan perekonomian. Sedangkan, kenaikan IHK dapat menyebabkan inflasi yang juga mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait stabilisasi ekonomi dan kebijakan moneter. Seperti contoh, dalam upaya pemulihan perekonomian Indonesia setelah kontraksi akibat pandemi Covid-19, pemerintah mendistribusikan anggaran APBN guna menaikkan konsumsi dalam negeri, peningkatan kegiatan dunia bisnis, dan mempertahankan stabilitas ekonomi serta perkembangan moneter (Pratiwi, 2022).

Riset ini juga sejalan dengan riset sebelumnya yang dilaksanakan oleh (Wibowo, 2018) penelitian tersebut menghasilkan IHK memiliki hubungan positif signifikan terhadap upah minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta koefisien regresi sebesar 0,00329. Di dalam riset tersebut dijelaskan bahwasanya penetapan upah minimum terdapat perbedaan yang didasarkan pada tingkat kemampuan, sifat, serta jenis pekerjaan di masing-masing perusahaan yang kondisinya berbeda-beda, dimana setiap wilayah atau daerah juga berbeda. Oleh sebab itu, upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Namun di dalam penelitian (Ferbrika Nurtyas, 2014) menunjukkan bahwa variabel IHK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap UMP.

4.3.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap UMP di Pulau Jawa

Hasil uji t menunjukkan angka t-statistik 21,28133 dengan angka probabilitas $0,0000 < 0,05$, bahwa regresi tersebut menyatakan bahwasanya secara parsial variabel tingkat pendidikan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap UMP di Pulau Jawa. Koefisien regresi tingkat pendidikan sebesar 0,248449 dengan tanda positif menerangkan setiap kenaikan 1 tahun total tingkat pendidikan, maka dapat menaikkan UMP di Pulau Jawa sebesar 0,248449 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya tingkat pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap UMP di Pulau Jawa Tahun 2013-2022.

Bagi negara-negara berkembang, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan ilmu pengetahuan di masyarakat, yang kedepannya akan berdampak pada pembangunan ekonomi suatu negara. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Pulau Jawa pada periode 2013-2022 meningkat disetiap tahunnya. Dilihat dari semakin lama pendidikan yang ditempuh oleh penduduk yang ada di Pulau Jawa. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator kualitas pendidikan.

Pulau Jawa memiliki rata-rata lama sekolah yang cukup tinggi yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di daerah ini cukup baik. Meskipun rata-rata lama sekolah pada Pulau Jawa mencukupi tinggi, namun ada kesenjangan dalam tingkat penyelesaian pendidikan di berbagai jenjang. Empat provinsi di Jawa, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, memiliki tingkat penyelesaian pendidikan pada jenjang SMA rendah.

Fasilitas yang memudahkan perolehan informasi dan kebutuhan lainnya oleh siswa diperlukan untuk membantu proses belajar mengajar. Keterlibatan pemerintah dalam menggalakkan pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan tidak bisa dipisahkan. Pembangunan infrastruktur yang didanai pemerintah dan memfasilitasi pemanfaatan teknologi bagi masyarakat akan memberikan hasil yang bermanfaat. Investasi pemerintah di bidang pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah sedang berupaya mengelola pendidikan di suatu daerah. Karena investasi di bidang pendidikan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi suatu daerah baik saat ini maupun di masa depan.

Seseorang yang memiliki waktu yang lebih lama dalam menempuh pendidikan, dapat meningkatkan produktivitas serta cenderung memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Hal tersebut selaras dengan teori model *Cobb Douglas* menjelaskan bahwa produktivitas memiliki hubungan dengan modal manusia (*human capital*). Dimana modal manusia merujuk pada sumber daya manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan kemampuan lain yang jika dikembangkan, mungkin akan meningkatkan produktivitas. Teori efisiensi upah juga mengatakan bahwasanya semakin besar upah yang diterima maka produktivitas pekerja dapat meningkat.

Riset ini juga sejalan dengan riset yang dilakukan oleh (Meinita, 2022) riset tersebut menghasilkan tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap UMP dengan koefisien sebesar 650222,9 dan didapatkan t-hitung sebesar 3,202505 > t-tabel 1,70526. Dalam proses mendapatkan pengetahuan serta keterampilan

melalui pendidikan tidak sekedar untuk kegiatan konsumtif, namun suatu bentuk investasi sumber daya manusia.

4.3.4 Pengaruh PDRB terhadap UMP di Pulau Jawa

Hasil uji t menunjukkan angka t-statistik 11,19778 dengan angka probabilitas $0,0000 < 0,05$, bahwa regresi tersebut menyatakan bahwasanya secara parsial variabel PDRB (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap UMP di Pulau Jawa. Koefisien regresi PDRB sebesar 0,148998 dengan tanda positif menyatakan setiap kenaikan 1 persen total PDRB, maka dapat menaikkan UMP di Pulau Jawa sebesar 0,148998 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap UMP di Pulau Jawa Tahun 2013-2022.

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maka kenaikan PDRB dijadikan sebagai acuan. Selain dapat melihat pertumbuhan ekonomi, UMP juga dapat ditentukan dengan melihat tingkat kenaikan harga pokok produk atau inflasi yang bersifat persisten dan berjangka panjang. Laju kenaikan inflasi tiap provinsi menjadi tolak ukur dalam memperkirakan nilai UMP yang pada gilirannya berdampak pada perekonomian daerah.

Economic growth juga menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian guna memperoleh tambahan penghasilan atau kesejahteraan penduduk dalam jangka tertentu. Selain itu, tenaga kerja di wilayah tersebut diharapkan dapat diserap oleh pembangunan ekonomi yang didorong oleh peningkatan PDRB karena pertumbuhan tersebut diperkirakan akan meningkatkan kapasitas produksi dan tingkat upah di wilayah tersebut. Hal ini didukung dengan data yang terdapat pada

Gambar 4.4 yang menunjukkan PDRB di setiap provinsi yang ada di Pulau Jawa terus meningkat setiap tahunnya.

Kenaikan *economic growth* dipengaruhi dari kenaikan upah minimum di suatu wilayah. Jikalau upah bertambah maka akan secara tidak langsung dapat menimbulkan lonjakan harga-harga di pasaran. Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat menimbulkan perubahan-perubahan dalam output serta kesempatan kerja. Sejumlah variabel seperti kemungkinan peningkatan produksi pangan, terjaganya ekspektasi inflasi, dan kemungkinan rendahnya harga komoditas global diantisipasi akan menjaga inflasi tetap pada kisaran sasarannya. Selain itu, kenaikan UMP yang signifikan meningkatkan bahaya tekanan inflasi.

Pada kuartal II tahun 2022, PDB atas dasar harga konstan Indonesia mencapai Rp 2,92 kuadriliun, menurut BPS. Jumlah tersebut meningkat 5,44% (yoy) dibandingkan triwulan II tahun sebelumnya. Pulau Jawa terus mendominasi struktur geografis perekonomian Indonesia pada kuartal kedua tahun 2022, menyumbang 56,55% PDB. Kuartal II tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan PDB Pulau Jawa sebesar 5,66% (yoy), menurut BPS. Sektor industri memberikan kontribusi penopang pertumbuhan sebesar 1,9%, disusul perdagangan sebesar 0,94%.

PDRB merupakan ukuran dari total output atau produksi ekonomi suatu daerah. PDRB yang tinggi dapat mencerminkan tingkat produktivitas ekonomi yang tinggi, yang dapat memperlihatkan bahwa daerah tersebut menghasilkan lebih banyak output dari input yang dimilikinya. Hal ini selaras dengan teori fungsi produksi yang mengatakan bahwa meningkatnya tenaga kerja dan modal dapat

menekan bertambahnya output. Akibatnya, bertambahnya output dapat mempengaruhi PDRB suatu daerah, yang pada nantinya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Riset ini juga sejalan dengan riset yang dilaksanakan oleh (Meinita, 2022) dalam riset tersebut menghasilkan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap UMP dengan hasil t -hitung $5,351019 > t$ -tabel $1,70526$. Namun dalam riset yang dilaksanakan oleh (Amelia et al., 2021) menghasilkan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap UMP di Pulau Kalimantan dengan hasil t -hitung $-1,812161 < t$ -tabel $2,03011$.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh IHK, Tingkat Pendidikan, dan PDRB Terhadap UMP di Pulau Jawa Tahun 2013-2022, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara parsial variabel IHK (X1) berpengaruh signifikan terhadap UMP dengan angka probabilitas uji t $0,0000 < 0,05$ serta angka koefisien bertanda positif. Variabel tingkat pendidikan (X2) berpengaruh signifikan terhadap UMP dengan angka probabilitas uji t $0,0000 < 0,05$ serta angka koefisien bertanda positif. Variabel PDRB (X3) berpengaruh signifikan terhadap UMP dengan angka probabilitas uji t $0,0000 < 0,05$ serta angka koefisien bertanda positif.
- b. Secara simultan variabel IHK (X1), tingkat pendidikan (X2), serta PDRB (X3) berpengaruh terhadap UMP (Y). Hal ini ditunjukkan dengan hasil angka F-statistik 82,92458 dengan angka probabilitas uji F $0,000000 < 0,05$, dalam model persamaan ini menunjukkan bahwa angka probabilitas $< 0,05$ maka dapat disimpulkan IHK, tingkat pendidikan, serta PDRB berpengaruh signifikan terhadap UMP.

5.2 Saran

- a. Dalam upaya menaikkan *economic growth* diharap Pemerintah Provinsi yang ada di Pulau Jawa dapat membuat regulasi baru mengenai upah minimum yang bisa diterima dengan baik kepada pengusaha maupun pekerja, sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik antara tenaga kerja dengan pengusaha serta pemerintah dengan tujuan mewujudkan adanya perjanjian bersama yang adil serta seimbang antar unsur-unsur tersebut terutama membicarakan terkait upah.
- b. Kepada peneliti selanjutnya guna dapat mempergunakan beberapa variabel lainnya yang dapat memberi kecenderungan atau mengendalikan upah minimum, serta memperluas rentan waktu data penelitian dan menggunakan objek lokasi lainnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Palangka, U. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Kebutuhan Hidup Layak terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Kalimantan*. 7, 1–12.
- Armavilla, K. E. (2023). *Upah Minimum di Berbagai Negara Asia Tenggara*. Good Stats. <https://data.goodstats.id/statistic/elmaarmavillia/upah-minimun-di-berbagai-negara-asia-tenggara-wZVTU>
- Armidi, A., Erfit, E., & Yulmardi, Y. (2018). *Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Harga Konsumen terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi*. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 7(1), 33–42. <https://doi.org/10.22437/jels.v7i1.4654>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Harga Konsumen*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html>
- BPS. (2022). *Indeks Harga Konsumen*. BPS. <https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html>
- Charysa, N. N. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011*. *Economics Development Analysis Journal*, 2(2), 88. <https://doi.org/10.29103/jeru.v2i2.1708>

- Dewi, Y. K., Farman, F., & Lisnawati, L. (2019). *The Effect of Consumer Price Index And The Amount Of Money Circulation On Net Assets Value Of Sharia Mutual Funds. Journal of Business*
<https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/job/article/view/160>
- Ferbrika Nurtyas. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014*. 5(2), 166–175.
- Gujarati, D.N, D.C Proter, S. G. (2009). *Basic Econometrics*. The McGraw-Hill.
- Ichsan, M. (2016). *Psikologi Pendidikan Dan Ilmu Mengajar*. JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling, 2(1), 60. <https://doi.org/10.22373/je.v2i1.691>
- Imam Santoso, H. M. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Indigo Media.
- Islami, N., & Anis, A. (2019). *Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan, 1(3), 939. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7721>
- Isna Rifka Sri Rahayu, E. D. (2023). *Syarat Indonesia Jadi Negara Maju: Gaji Pekerja Minimal Rp 10 Juta Per Bulan*. Kompas.Com.
<https://money.kompas.com/read/2023/10/11/190400926/syarat-indonesia-jadi-negara-maju-gaji-pekerja-minimal-rp-10-juta-per-bulan>
- Karl E. Case, R. C. F. (2002). *Prinsip-Prinsip Ekonomi* (8th ed.). Erlangga.
- Karlina, B. (2017). Pengaruh Tingkat Inflasi, Indeks Harga Konsumen Terhadap PDB di Indonesia Pada Tahun 2011-2015. *Pengaruh Tingkat Inflasi, Indeks Harga Konsumen Terhadap PDB Di Indonesia Pada Tahun 2011-2015*, 6(1), 1–12.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP

AMP YKPN.

Kyswantoro, Y. F. (2017). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Human Development Index (Hdi) Pada 6 Daerah Tertinggal Di Pulau Jawa Tahun 2010-2016*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 15(2), 113. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5359>

Mankiw, G. (2006). *Macroeconomics edition 6*. In *Macroeconomics edition 6 (6th ed., pp. 164–165)*. Erlangga.

Meinita, W. (2022). *Pengaruh Inflasi, Tingkat Pendidikan dan Product Domestic Regional Bruto (Pdrb) terhadap Upah Minimum Provinsi Di Provinsi* 2(3), 349–360.

http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/10804%0Ahttp://repository.fe.unj.ac.id/10804/9/JURNAL_FULL_WIDYA_MEINITA_1701617010.pdf

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023*. April 2020, 2021–2022.

Miswar. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah Pekerja di Aceh*. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia, 5(1), 17–34.

Musfiqon. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT. Prestasi Pustakaraya.

Nugraha, A. P. (2017). *Pengaruh Hubungan Tingkat Usia, Tingkat Pendidikan, Dan Tingkat Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Wanita Pr. Jaya Makmur Kabupaten Malang*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–11.

Nurkholis, A. (2016). *Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable*

Development Theory, People Centered Development Theory. 1–16.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum.* Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.

<https://jdih.kemnaker.go.id/pengupahan.html>

Pratiwi, Y. R. (2022). *Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19.* DJKN Kemenkeu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>

Puguh, S. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis : Pendekatan Filosofi Dan Praktis.* PT Indeks.

Putri, Y. A. K. D., & Kusreni, S. (2017). *Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia.* Jiep, 17(2), 67–77.

Rahmi, J., & Riyanto. (2022). *Dampak Upah Minimum terhadap Produktivitas Tenaga Kerja: Studi Kasus Industri Manufaktur Indonesia (The Impact of Minimum Wage on Labor Productivity: Evidence from Indonesian Manufacturing Industry).* Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 13(1), 1–12.

Samuelson, P. A. (2003). *Ilmu Mikro Ekonomi* (17th ed.). PT Global Media Edukasi.

Setyorini, V. P. (2023). *PDB Malaysia tumbuh 8,7 persen pada 2022.* AntaraNews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/3391086/pdb-malaysia-tumbuh-87-persen-pada-2022#mobile-nav>

- Sholichah, A. S. (2018). *Teori-Teori Pendidikan Dalam Al-Qur'an*. Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam, 7(01), 23. <https://doi.org/10.30868/ei.v7i01.209>
- Sihombing, P. R. (2015). *Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan dan Investasi di Indonesia Tahun 2011-2015*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2015(Mi), 5–24.
- Simanjuntak, P. J. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. LPFE: UI.
- Sukirno, S. (2019). *Teori Pengantar Makroekonomi Edisi ke 3 (ke 3)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sumantri, F., & Latifah, U. (2019). *Pengaruh Ekonomi Makro terhadap Indeks Harga Konsumen*. *Economics Development Analysis Journal*, 3(1), 25–34. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v3i1.4638>
- Tiflatul Husna, Dani Sukma Agus Setiawan, & Dinda Redno Tryandari. (2020). *Prossiding Seminar Hasil Penelitian 2019 Diselenggarakan di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Medan 01 Oktober 2020 Kerjasama Antara Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dan Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Bina Gun*. *Prossiding Seminar Hasil Penelitian 2019*, 86, 120–126.
- Todaro, M. p. dan S. C. S. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.
- Wibowo, A. A. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2016*. *Ekonomi Dan Bisnis*, 1–12.
- Widarjono, A. (2016). *Ekonometrika*. UPP STIM YKPN.

Wulansari, R. A., Wilantari, R. N., Iesp, J., Ekonomi, F., Unej, U. J., & Kalimantan, J. (2014). *Hubungan Kausalitas Upah Minimum Provinsi Dan Inflasi Di Indonesia Periode 1997-2014 (The Causality Relationship Between Province Minimum Wage And Inflation In Indonesia In The Period Of 1997-2014)*. 2014.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel UMP Pulau Jawa Tahun 2013-2022 (Rupiah)

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2013	Rp 2.200.000	Rp 850.000	Rp 830.000	Rp 947.114	Rp 866.250	Rp 1.170.000
2014	Rp 2.441.000	Rp 1.000.000	Rp 910.000	Rp 988.500	Rp 1.000.000	Rp 1.325.000
2015	Rp 2.700.000	Rp 1.000.000	Rp 910.000	Rp 988.500	Rp 1.000.000	Rp 1.600.000
2016	Rp 3.100.000	Rp 1.312.355	Rp 1.265.000	Rp 1.182.510	Rp 1.283.000	Rp 1.784.000
2017	Rp 3.355.750	Rp 1.420.624	Rp 1.367.000	Rp 1.337.645	Rp 1.388.000	Rp 1.931.180
2018	Rp 3.648.036	Rp 1.544.361	Rp 1.486.065	Rp 1.454.154	Rp 1.508.895	Rp 2.099.385
2019	Rp 3.940.973	Rp 1.668.373	Rp 1.605.396	Rp 1.570.923	Rp 1.630.059	Rp 2.267.991
2020	Rp 4.276.350	Rp 1.810.351	Rp 1.742.015	Rp 1.704.608	Rp 1.768.777	Rp 2.460.997
2021	Rp 4.416.187	Rp 1.810.351	Rp 1.798.979	Rp 1.765.000	Rp 1.868.777	Rp 2.460.997
2022	Rp 4.641.854	Rp 1.841.487	Rp 1.812.935	Rp 1.840.916	Rp 1.891.567	Rp 2.501.203

Lampiran 2 Tabel IHK Pulau Jawa Tahun 2013-2022 (persen)

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2013	144,27	145,87	141,90	145,65	146,50	148,87
2014	119,41	117,93	118,83	116,84	118,00	122,94
2015	123,35	120,96	122,30	120,45	121,01	128,22
2016	126,27	124,21	125,29	123,21	123,57	132,54
2017	130,97	129,06	130,16	128,39	128,15	138,68
2018	130,97	129,06	130,16	128,39	128,15	138,07
2019	135,25	133,22	133,98	131,81	131,47	142,35
2020	139,62	136,92	137,53	135,46	134,19	147,23
2021	105,96	105,69	105,09	106,10	104,75	106,06
2022	107,58	107,46	107,06	108,53	106,86	108,19

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Lampiran 3 Tabel Rata-Rata Lama Sekolah di Pulau Jawa Tahun 2013-2022

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2013	10,47	7,58	6,8	8,72	6,9	8,17
2014	10,54	7,71	6,93	8,84	7,05	8,19
2015	10,7	7,86	7,03	9	7,14	8,27
2016	10,88	7,95	7,15	9,12	7,23	8,37
2017	11,02	8,14	7,27	9,19	7,34	8,53
2018	11,06	8,61	7,84	9,73	7,93	8,93
2019	11,11	8,79	8,03	9,83	8,11	9,07
2020	11,17	8,96	8,19	9,95	8,31	9,22
2021	11,2	9,03	8,26	10,04	8,37	9,29
2022	11,3	9,14	8,38	10,07	8,5	9,46

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Lampiran 4 Tabel PDRB ADHK Menurut Pengeluaran di Pulau Jawa Tahun 2013-2022 (Rupiah)

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2013	1.296.694.573.470,00	1.093.543.545.870,00	726.655.118.060,00	75.627.449.590,00	1.192.789.801.810,00	331.099.105.500,00
2014	1.373.389.129.110,00	1.149.216.057.050,00	764.959.150.950,00	79.536.081.750,00	1.262.684.495.070,00	349.351.227.660,00
2015	1.454.563.847.380,00	1.207.232.341.560,00	806.765.092.170,00	83.474.451.550,00	1.331.376.098.900,00	368.377.203.020,00
2016	1.539.916.881.030,00	1.275.619.241.160,00	849.099.354.690,00	87.685.809.610,00	1.405.563.511.020,00	387.835.089.450,00
2017	1.635.359.147.340,00	1.343.662.141.830,00	893.750.296.170,00	92.300.243.890,00	1.482.299.576.830,00	410.136.998.420,00
2018	1.735.208.291.060,00	1.419.624.140.040,00	941.091.143.860,00	98.024.014.330,00	1.563.441.824.560,00	433.782.714.150,00
2019	1.836.240.549.510,00	1.490.959.687.100,00	991.516.543.310,00	104.485.458.810,00	1.649.895.641.460,00	456.620.034.950,00
2020	1.729.291.087.190,00	1.453.380.722.840,00	965.227.269.210,00	101.698.520.170,00	1.611.392.546.770,00	441.148.577.280,00
2021	1.856.075.823.570,00	1.507.746.390.140,00	997.345.051.890,00	107.372.560.330,00	1.668.749.444.870,00	460.963.023.640,00
2022	1.953.455.853.410,00	1.589.984.926.310,00	1.050.322.126.930,00	112.898.323.170,00	1.757.821.433.390,00	484.141.829.550,00

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Lampiran 5 Hasil Uji *Common Effect Model*

Dependent Variable: LOGY
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/06/24 Time: 03:04
 Sample: 1 60
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.578003	0.723536	10.47357	0.0000
X1	-0.000937	0.001877	-0.499115	0.6197
X2	0.292158	0.018652	15.66341	0.0000
LOGX3	0.157555	0.022951	6.864729	0.0000
R-squared	0.835961	Mean dependent var		14.32632
Adjusted R-squared	0.827174	S.D. dependent var		0.431916
S.E. of regression	0.179558	Akaike info criterion		-0.532299
Sum squared resid	1.805496	Schwarz criterion		-0.392676
Log likelihood	19.96897	Hannan-Quinn criter.		-0.477685
F-statistic	95.12771	Durbin-Watson stat		1.407479
Prob(F-statistic)	0.000000			

UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

Lampiran 6 Hasil Uji *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: LOGY
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/06/24 Time: 03:09
 Sample: 1 60
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.908288	0.719955	5.428519	0.0000
X1	0.033061	0.004690	7.048947	0.0000
X2	0.248449	0.011674	21.28133	0.0000
LOGX3	0.148998	0.013306	11.19778	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.954899	Mean dependent var	14.32632
Adjusted R-squared	0.943383	S.D. dependent var	0.431916
S.E. of regression	0.102771	Akaike info criterion	-1.523486
Sum squared resid	0.496411	Schwarz criterion	-1.069711
Log likelihood	58.70458	Hannan-Quinn criter.	-1.345990
F-statistic	82.92458	Durbin-Watson stat	3.038348
Prob(F-statistic)	0.000000		

UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

Lampiran 7 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	13.771528	(9,47)	0.0000
Cross-section Chi-square	77.471218	9	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: LOGY
Method: Panel Least Squares
Date: 01/06/24 Time: 03:11
Sample: 1 60
Periods included: 6
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.578003	0.723536	10.47357	0.0000
X1	-0.000937	0.001877	-0.499115	0.6197
X2	0.292158	0.018652	15.66341	0.0000
LOGX3	0.157555	0.022951	6.864729	0.0000

R-squared	0.835961	Mean dependent var	14.32632
Adjusted R-squared	0.827174	S.D. dependent var	0.431916
S.E. of regression	0.179558	Akaike info criterion	-0.532299
Sum squared resid	1.805496	Schwarz criterion	-0.392676
Log likelihood	19.96897	Hannan-Quinn criter.	-0.477685
F-statistic	95.12771	Durbin-Watson stat	1.407479
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 8 Hasil Uji *Random Effect Model*

Dependent Variable: LOGY
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/06/24 Time: 03:15
 Sample: 1 60
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 60
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.695917	0.433146	17.76749	0.0000
X1	0.000100	0.001380	0.072561	0.9424
X2	0.280373	0.011013	25.45842	0.0000
LOGX3	0.152237	0.013194	11.53847	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.035812	0.1083
Idiosyncratic random			0.102771	0.8917
Weighted Statistics				
R-squared	0.838022	Mean dependent var		10.89669
Adjusted R-squared	0.829344	S.D. dependent var		0.397030
S.E. of regression	0.164015	Sum squared resid		1.506448
F-statistic	96.57522	Durbin-Watson stat		1.673603
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.833466	Mean dependent var		14.32632
Sum squared resid	1.832966	Durbin-Watson stat		1.375474

Lampiran 9 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	89.630057	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.033061	0.000100	0.000020	0.0000
X2	0.248449	0.280373	0.000015	0.0000
LOGX3	0.148998	0.152237	0.000003	0.0602

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOGY

Method: Panel Least Squares

Date: 01/06/24 Time: 03:17

Sample: 1 60

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 60

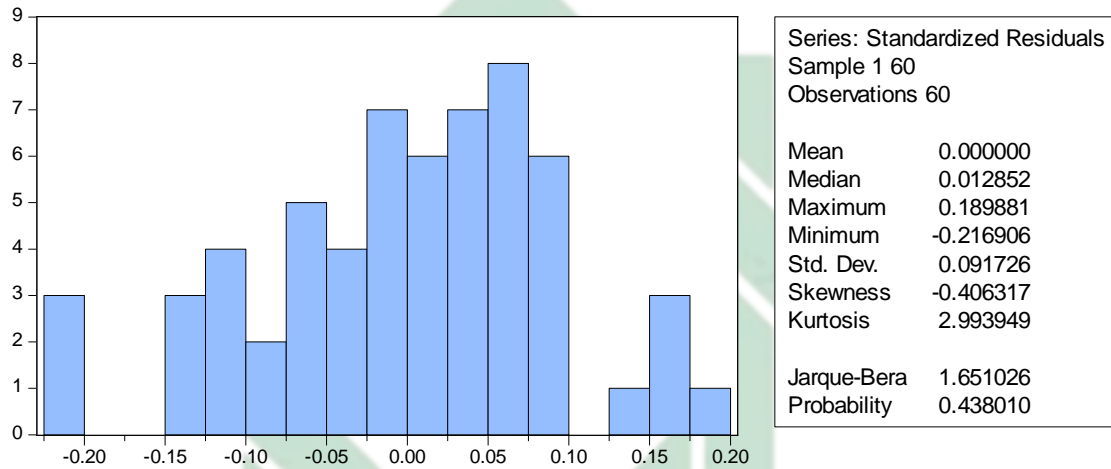
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.908288	0.719955	5.428519	0.0000
X1	0.033061	0.004690	7.048947	0.0000
X2	0.248449	0.011674	21.28133	0.0000
LOGX3	0.148998	0.013306	11.19778	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.954899	Mean dependent var	14.32632
Adjusted R-squared	0.943383	S.D. dependent var	0.431916
S.E. of regression	0.102771	Akaike info criterion	-1.523486
Sum squared resid	0.496411	Schwarz criterion	-1.069711
Log likelihood	58.70458	Hannan-Quinn criter.	-1.345990
F-statistic	82.92458	Durbin-Watson stat	3.038348
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 10 Hasil Uji Normalitas



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Lampiran 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/06/24 Time: 03:32
 Sample: 1 60
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.166995	0.220748	-0.756496	0.4525
X1	-0.000913	0.000573	-1.593398	0.1167
X2	-0.003058	0.005691	-0.537290	0.5932
LOGX3	0.013954	0.007002	1.992813	0.0512
R-squared	0.115271	Mean dependent var		0.071467
Adjusted R-squared	0.067875	S.D. dependent var		0.056742
S.E. of regression	0.054782	Akaike info criterion		-2.906557
Sum squared resid	0.168062	Schwarz criterion		-2.766934
Log likelihood	91.19670	Hannan-Quinn criter.		-2.851942
F-statistic	2.432075	Durbin-Watson stat		1.643521
Prob(F-statistic)	0.074535			

UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

Lampiran 13 Hasil Uji Autokorelasi

Dependent Variable: LOGY
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/06/24 Time: 03:35
 Sample: 1 60
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.908288	0.719955	5.428519	0.0000
X1	0.033061	0.004690	7.048947	0.0000
X2	0.248449	0.011674	21.28133	0.0000
LOGX3	0.148998	0.013306	11.19778	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.954899	Mean dependent var	14.32632
Adjusted R-squared	0.943383	S.D. dependent var	0.431916
S.E. of regression	0.102771	Akaike info criterion	-1.523486
Sum squared resid	0.496411	Schwarz criterion	-1.069711
Log likelihood	58.70458	Hannan-Quinn criter.	-1.345990
F-statistic	82.92458	Durbin-Watson stat	3.038348
Prob(F-statistic)	0.000000		

UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A